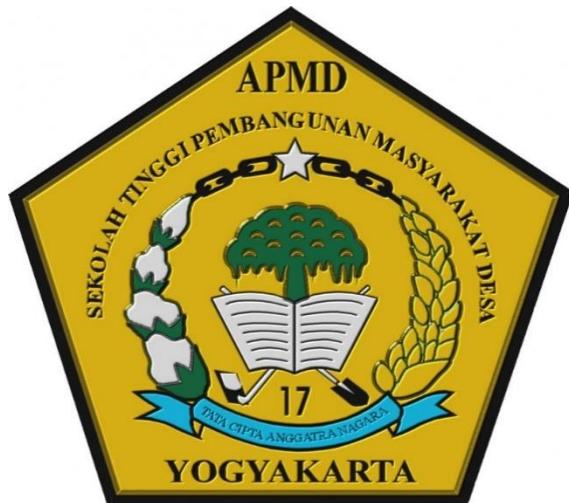


**KOLABORATIF GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh :

RINI ADMIWATI

NIM : 23610039

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

KOLABORATIF GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh
RINI ADMIWATI
23610039

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Pada tanggal 5 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS
KOLABORATIF GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Rini Admiwati

23610039

Disahkan oleh Tim Pengaji

Pada tanggal: 5 Juni 2025

Susunan Tim Pengaji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. SUGIYANTO, S.Sos., M.M.

Ketua/Pembimbing

2. Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, S. Sos.,
M.Si.

Pengaji Samping I

3. Dr. SUPARDAL, M.Si.

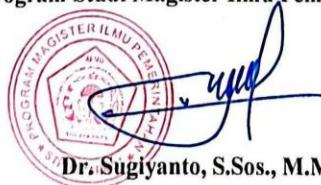
Pengaji Samping II



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

NIDN: 0510096701

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rini Admiwati, S. Sos.

NIM : 23610039

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **KOLABORATIF GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 2025

Yang membuat pernyataan,



RINI ADMIWATI

HALAMAN MOTO

“Ilmu tanpa amal adalah sia- sia, amal tanpa ilmu adalah kesesatan.”

(Imam Al-Ghazali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT karena atas izin dan karunianya maka tesis ini dapat dibuat dan diselesaikan. Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Terima kasih kepada bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya serta meluangkan waktu demi saya sehingga dapat tersusun tesis saya dengan benar.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S. Sos., M.Si. dan Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, kritik dan saran, untuk menguji tesis saya dan mempertajam karya ini.
4. Terima kasih kepada suami tercinta Bapak Wardaya dan Anak-anak Mas Gigih Adhiyodha dan Mas Sena Adhirajasa yang selalu mendoakan, mensupport dan memberikan mendukung yang tiada henti selama perjalanan ini.
5. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan MIP 32 Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini adalah (1) Mengetahui kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); dan (2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik validasi data atau uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kolaborasi pemerintah dalam pembangunan kepemudaan di DIY telah berlangsung secara aktif tetapi belum maksimal meskipun telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor; dan (2) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kolaborasi ini meliputi komitmen pemerintah dalam mengembangkan kebijakan kepemudaan, keterlibatan aktif berbagai aktor dalam implementasi program, serta adanya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Kemudian faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas kolaborasi diantaranya meliputi keterbatasan koordinasi antar aktor, perbedaan kepentingan yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan, serta ketimpangan sumber daya yang menyebabkan implementasi program tidak merata.

Kata Kunci: *Kolaboratif Government, Pembangunan Kepemudaan, Kolaborasi Lintas Sektor*

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) To determine collaborative government in youth development in the Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); and (2) To determine supporting factors and inhibiting factors of collaborative government in youth development in the DIY.

The type of research used in this study is qualitative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used are interviews and documentation studies. The informant selection technique uses purposive sampling technique. The data validation technique or data validity test uses triangulation technique, namely source triangulation. The data analysis technique uses qualitative analysis which includes data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification.

The results of the study indicate that (1) Government collaboration in youth development in the DIY has been active but has not been maximized even though it has involved various stakeholders across sectors; and (2) Factors that support the success of this collaboration include government commitment in developing youth policies, active involvement of various actors in program implementation, and adequate infrastructure and resource support. Then the inhibiting factors that can reduce the effectiveness of collaboration include limited coordination between actors, differences in interests that can hinder the decisionmaking process, and resource inequality that causes uneven program implementation.

Keywords: *Collaborative Government, Youth Development, Cross Sector Collaboration*

DAFTAR ISI

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literatur	12
C. Fokus Penelitian	18
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
F. Kerangka Konseptual	21
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pemilihan Informan	44
F. Teknik Validasi Data	48

G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	53
A. Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY	53
B. Gambaran Koordinasi Lintas Sektor.....	56
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	67
A. Kolaboratif <i>Government</i> Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	67
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kolaboratif <i>Government</i> Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	89
C. Pembahasan.....	99
D. Kebaruan	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
C. Keterbatasan Penelitian.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang Republik Indonesia telah menunjukkan keterlibatam penting pemuda dalam mewarnai dinamika kehidupan kebangsaan. Secara formal, pemuda didefiniskan sebagai bagian penduduk yang memiiki rentang umur tertentu. Bila merujuk pada dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinsikan pemuda adalah penduduk dengan rentang usia 15-24 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemuda yang selanjutnya disebut UU Pemuda mendefinisikan pemuda sebagai warga negara negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan dengan rentang usia 16-30. Badan Pusat Statistik sendiri mendefinisikan pemuda sebagai penduduk dengan rentang usia 15-29 tahun (L. M. Hakim & Qurbani, 2021).

Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi 4.0 dan *society* 5.0. Dinamika ini secara tidak langsung membuat kelompok pemuda akan menghadapi tantangan sangat dinamis yang ditandai dengan perubahan struktur ekonomi, pendidikan dan ketenagakerjaan, urbanisasi dan cepatnya perkembangan teknologi-informasi. Pemuda memiliki tantangan baru agar dapat bersikap lebih adaptif, kritis, mandiri, memiliki daya observasi, dan visioner agar mampu bertahan dalam konteks persaingan global (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Selain itu, pemuda juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pembangunan kualitas pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan bangsa karena pemuda

merupakan penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan menjadi salah satu penentu optimalisasi bonus demografi (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

Berdasarkan data Susenas tahun 2023, jumlah pemuda Indonesia diperkirakan sekitar 64,16 juta jiwa dengan persentase sebesar 23,18 persen pemuda. Selanjutnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase jumlah pemuda di Indonesia mengalami tren yang relatif menurun dari sebesar 24,01 persen di tahun 2019 menjadi 23,18 persen di tahun 2023. Penurunan persentase ini diduga karena adanya tingkat kelahiran penduduk yang relatif menurun (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024). Meskipun terjadi penurunan tren, namun jumlah pemuda tetap mengisi komposisi yang besar, yaitu sekitar 64,16 juta jiwa dalam demografi Indonesia (Rifano, 2021).

Dengan jumlah pemuda yang besar, yaitu sekitar 64,16 juta jiwa dalam demografi Indonesia ini, hal ini dapat menjadi keuntungan, yaitu bahwa terdapat kelimpahan umur produktif, namun juga dapat berubah menjadi kerugian. Namun pada sisi lain, kerugian juga dapat terjadi, yaitu dimana dapat terjadinya ledakan pengangguran dan penyebaran radikalisme yang menyasar pemuda. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang dapat melibatkan kembali pemuda dalam pembangunan (Rifano, 2021). Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya membangun pemuda sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, dapat mengacu pada Indeks Pembangunan Pemuda yang selanjutnya disebut IPP, sebagai alat ukur keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun pemuda (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

IPP pada dasarnya dapat dipahami sebagai seperangkat instrumen yang telah dibentuk untuk mengukur upaya pemberdayaan atau pembangunan pemuda yang telah dilakukan oleh pemerintah. Selain berguna

untuk menangkap gambaran kemajuan pembangunan secara umum, indeks ini juga dapat menjadi rujukan bagi kebijakan atau strategi pembangunan pemuda sebagai upaya peningkatan kapasitas pemuda. Indeks ini berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan provinsi untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda, terutama yang sejalan dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut TBP di Indonesia (L. M. Hakim & Qurbani, 2021).

IPP di Indonesia hingga saat ini baru tersedia di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang capaian IPP provinsi (Fitriyanti & Pradana, 2022). Pada Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY, berdasarkan data Statistik Pemuda tahun 2023, diketahui bahwa dengan jumlah persentase pemuda sebesar 21,95 persen (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk DIY, nilai IPP DIY pada tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu dengan nilai 73,33 dari 67,50 di tahun 2022, dan dengan nilai 73,33 ini DIY menjadi provinsi dengan IPP tertinggi nasional. Penopang kenaikan nilai IPP pada provinsi DIY adalah domain kesehatan dan kesejahteraan dengan selisih nilai 12,5 poin yaitu 47,5 pada tahun 2022 dan 60 pada tahun 2023. Selain itu, domain lapangan dan kesempatan kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 70 pada tahun 2022 dan 80 pada tahun 2023. Domain partisipasi dan kepemimpinan juga memberikan andil dalam peningkatan IPP, yaitu nilainya meningkat dari 53 pada 2022 menjadi 60 di tahun 2023. Dua domain lainnya, yaitu domain

pendidikan serta domain gender dan diskriminasi mengalami hal yang stagnan pada tahun sebelumnya (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

DIY pada dasarnya unggul jika dibandingkan dengan rata-rata nasional hampir di semua domain kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Data dukung unggul ini bersumberkan dari IPP Tahun 2024 pada lima domain yang diterbitkan (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024), yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

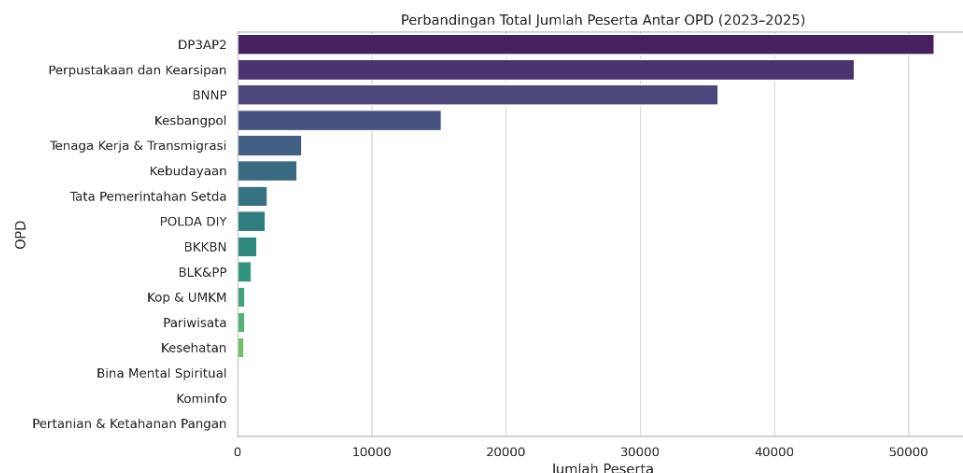
Tabel 1.1 IPP Domain Pendidikan, Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Domain Gender dan Diskriminasi di Provinsi Yogyakarta Tahun 2024

No	Provinsi	Domain Pendidikan	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Domain Gender dan Diskriminasi
1	DI Yogyakarta	90,00	60,00	80,00	60,00	76,67

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas, meskipun IPP DIY cukup tinggi pada beberapa domain, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, dimana terdapat dua indikator yang nilainya masih berada di bawah rata-rata nasional seperti pada domain partisipasi dan kepemimpinan dan domain kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, pemuda yang memberikan saran ketika rapat juga masih berada di bawah rata-rata nasional (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

Rekapitulasi jumlah pemuda peserta kegiatan dari setiap Perangkat Daerah (PD) DIY sepanjang tahun 2023 hingga 2025 memberikan gambaran mengenai sebaran pelibatan masyarakat dalam berbagai agenda pemerintah daerah.



Gambar I.1 Jumlah Peserta Pemuda Dalam Kegiatan PD DIY

Pendekatan *Collaborative Government* menekankan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini kepemudaan, dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik. Berdasarkan data jumlah peserta kegiatan PD DIY dalam kurun waktu 2023-2025, tampak variasi yang cukup signifikan antar instansi dalam mengadopsi praktik kolaboratif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) menjadi aktor utama dalam kolaborasi pemuda dengan total 51.898 peserta, menunjukkan kapasitas luar biasa dalam membangun jejaring kemitraan, terutama dalam isu-isu strategis seperti perlindungan perempuan dan anak. Disusul oleh Perpustakaan dan Kearsipan dengan 45.937 peserta, yang menandakan keberhasilan kolaborasi lintas lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan media digital dalam

meningkatkan minat baca dan akses informasi. BNNP hanya mencatat partisipasi di tahun 2024, namun langsung mencatatkan angka sangat tinggi (35.775 peserta). Ini mengindikasikan adanya kolaborasi besar-besaran yang bersifat temporer namun sangat efektif.

Kesbangpol, Tenaga Kerja & Transmigrasi, dan Kebudayaan menempati posisi menengah dengan partisipasi berkelanjutan, menandakan upaya yang relatif konsisten dalam membangun kolaborasi sosial-politik dan ketenagakerjaan. Sementara itu, Polda DIY menunjukkan partisipasi konstan (680 peserta per tahun) yang menunjukkan stabilitas namun berpotensi untuk diperluas melalui kemitraan yang lebih strategis dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Sebaliknya, PD seperti Kominfo, Pertanian & Ketahanan Pangan, serta Bina Mental Spiritual menunjukkan angka partisipasi yang stagnan dan rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya integrasi lintas sektor atau minimnya pendekatan partisipatif dalam program kerja mereka. Padahal, sektor-sektor ini memiliki potensi kolaboratif tinggi terutama dalam isu ketahanan pangan, digitalisasi, dan penguatan nilai spiritual masyarakat.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Dikpora DIY 2024, dikemukakan bahwa Dinas Dikpora DIY sebagai penanggung jawab kegiatan kepemudaan berupaya untuk memberikan wadah bagi berbagai kegiatan kepemudaan yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan mengembangkan kreativitas serta kemandirian pemuda. Kinerja sasaran terwujudnya pembinaan terhadap pemuda diukur dengan indikator persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan. Analisis ketercapaian sasaran persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan adalah sebagai berikut (Dinas Dikpora DIY, 2023):

1. Tercapai 11,86%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,51% (terlampaui).
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu (2021) sebesar 11,58%, terdapat peningkatan sebesar 0,28% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 11,86%.
3. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan didukung dari penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang mewadahi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan lembaga kepemudaan di bawah Dinas Dikpora seperti KWARDA. Kegiatan-kegiatan kepemudaan ini antara lain pengembangan kewirausahaan berupa kegiatan lomba sentra kewirausahaan pemuda, lomba wirausahamuda, pelatihan pemasaran *online* bagi pemuda, pelatihan pemasaran online bagi pemuda dikantong kemiskinan, pelatihan sentra kewirausahaan pemuda dan penyelenggaraan kegiatan pemuda bagi pelajar seperti seleksi Paskibraka, seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan *workshop* antinarkoba, lomba pemuda pelopor, seleksi pertukaran pemuda antar provinsi, seleksi pertukaran pemuda antar negara, seleksi talenta muda, seleksipasangan inspiratif, seleksi pemuda kader bela negara, seleksi kepemimpinan pemuda, pelatihan pemuda kader anti narkoba. Sasaran kegiatan pengembangan kewirausahaan terutama ditujukan pada para pemuda yang ada di wilayah kantong kemiskinan di DIY dengan harapan

dapat membantu para pemuda memaksimalkan potensi dan hasil industri di daerah tersebut (Dinas Dikpora DIY, 2023).

Adapun rumusan arah kebijakan dan strategi untuk urusan kepemudaan menurut Rancangan Akhir Renstra 2022-2027 adalah sebagai berikut (Dinas Dikpora, 2021):

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara kementerian pemuda dan olahraga dengan lembaga-lembaga lainnya dan stakeholders terkait dalam rangka peningkatan IPP dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
3. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam tingkat global.
4. Peningkatan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda dalam rangka peningkatan IPP.
5. Peningkatan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila.
6. Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila, serta upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkotika, psikotropika, merokok, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perudungan, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan, diharapkan melalui perolehan IPP ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dari keberhasilan kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY, karena nilai IPP ini merupakan indikator dari keberhasilan dari

pembangunan pemuda di suatu provinsi, baik melalui program-program yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD maupun melalui kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Dalam Peraturan Presiden ini pada Pasal 1 angka (3) dijelaskan bahwa Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya. Berikutnya pada angka (7) dijelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/ atau kabupaten/ kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dengan mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kepemudaan, serta masyarakat sipil. Melalui kolaborasi yang lebih efektif, regulasi ini diharapkan dapat menguatkan sinergi antar instansi guna menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan pemuda Indonesia agar lebih berdaya saing, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, maupun bidang-bidang lainnya.

Secara spesifik di DIY, mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027. Peraturan Gubernur ini yang selanjutnya disingkat Pergub, ditetapkan pada 29 November 2023. Pergub ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan kepemudaan di DIY melalui program-program terstruktur yang melibatkan berbagai sektor. Langkah-langkah ini mencakup inisiatif yang disesuaikan dengan Undang-Undang terkait pelayanan kepemudaan, seperti Perpres Nomor 43 Tahun 2022, sebagai acuan hukumnya. Fokus pada Pergub ini mencakup pengembangan potensi pemuda, peningkatan partisipasi dalam pembangunan, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Adapun kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan DIY dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Contohnya, Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY mengadakan Sosialisasi Kepemudaan untuk memperluas informasi terkait program-program yang dapat diakses oleh pemuda berusia 16-30 tahun (Natalia, 2024). Kegiatan pemberdayaan bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Melalui Disdikpora, pemerintah daerah mengadakan berbagai program seperti Seleksi Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta, yang mengidentifikasi dan mendukung pemuda dengan inovasi di bidang teknologi. Selain itu, Lomba Kreativitas Pemuda diadakan untuk mendorong ide-ide kreatif dalam bentuk proposal event dengan tema Expo Karya Pemuda (Deni, 2024). Kegiatan pengembangan kepemudaan juga menjadi fokus

utama. Misalnya, Pemerintah memfasilitasi ruang interaksi bagi pemuda melalui acara seperti Jogja Youth Festival, yang mendorong organisasi kepemudaan untuk berkolaborasi dan memperkuat ekosistem pemuda guna menghasilkan perubahan positif dan produktif (Admin Warta, 2023). Melalui berbagai program tersebut, diharapkan pemuda Yogyakarta dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, menjadi agen perubahan yang positif, dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Adapun mengenai tim koordinasi lintas sektor kepemudaan di DIY, diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY. Pada Keputusan Gubernur yang selanjutnya disebut Kepgub ini dikemukakan bahwa tim koordinasi lintas sektor kepemudaan DIY terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dan saran kepada Tim Pelaksana, sedangkan Tim Pelaksana bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023-2027. Adapun Tim Pelaksana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Dengan adanya kolaborasi antar lintas sektor antara Tim Pengarah dan Tim Pelaksana serta Sekretariat, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan kepemudaan di DIY dengan indikator perolehan IPP.

Pemerintah DIY telah menunjukkan komitmen dalam pembangunan kepemudaan melalui kebijakan strategis seperti penetapan *Rencana Aksi Kepemudaan* dan pembentukan *Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan* berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2024. Kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pendekatan kolaboratif antar PD dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, dalam

praktiknya, masih ditemukan ketimpangan pelaksanaan. Keterlibatan pemuda belum menjadi perhatian merata di setiap perangkat daerah. Beberapa PD menunjukkan komitmen tinggi melalui jumlah kegiatan dan peserta yang signifikan, sementara sebagian lainnya minim atau bahkan tidak melibatkan pemuda sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya terimplementasi secara sistematis dan menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan permasalahan dan merumuskan strategi penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan DIY.

B. Kajian Literatur

Kajian literatur/penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang terkait dengan penelitian yang diangkat peneliti diantaranya yaitu:

1. Penelitian (Fitriyanti & Pradana, 2022) yang berjudul “Analisis Pembangunan Kepemudaan Di Kota Banjarbaru Menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (Domain Pendidikan Dan Lapangan & Kesempatan Kerja)”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pembangunan. Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan SDM yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa domain Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cukup tinggi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Penelitian (Sudirman et al., 2018) yang berjudul “Kajian Strategi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Di Kabupaten Luwu Utara”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kebijakan.

Strategi dan kebijakan pembangunan kepemudaan adalah mendorong dan mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersifat positif, serta mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemuda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara antara lain adalah penyediaan sarana kepemudaan oleh pemerintah daerah, tingkat populasi pemuda yang tinggi, tingkat keikutsertaan pendidikan yang tinggi, dan adanya dukungan dari pemerintah.

3. Penelitian (M. A. L. Hakim et al., 2023) yang berjudul “Konstruksi Dasar Masalah Implementasi Kebijakan Kepemudaan Di Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kebijakan. Tujuan terdalam konstruksi kebijakan kepemudaan adalah untuk menempatkan kalangan muda dalam takhta tertinggi sebagai atraktor yang menjadi region magnetik akselerasi perubahan dalam realitas bermasyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemuda di Kabupaten Cianjur mempunyai respons dan keinginan keterlibatan yang cukup besar untuk aktif terlibat dalam pelayanan kepemudaan baik sesuai kerangka kebijakan nasional maupun pembangunan pemuda berbasis pendekatan organisasi 4-H.
4. Penelitian (Arifin et al., 2021) yang berjudul “Kebijakan Pengembangan Bidang Kepemudaan Dalam Tata Kelola APBDes (Studi Keberpihakan Pemerintah Desa Kedungturi terhadap Pengembangan Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019)”. Teori yang digunakan pada penelitian ini

- adalah politik anggaran dalam teori Wildavsky. Wildavsky menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sekedar untuk membuat anggaran yang lebih baik atau better budget melainkan harus memperhatikan dimensi politik anggaran terutama terkait dengan “*who gets what*” atau siapa memperoleh apa yang memiliki dua kegunaan yakni fungsi alokasi dan distribusi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya konfigurasi politik anggaran pemerintah desa terhadap pengembangan karang taruna. *Sharing and Bargaining process* dilakukan secara bersama-sama melalui forum musrenbang desa sistem serap aspirasi penyusunan RAPBDes. Melalui musyawarah Pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan pendapat terkait keberpihakan anggaran terhadap bidang pengembangan kepemudaan melalui organisasi Karang Taruna Desa.
5. Penelitian (Efendi, 2020) yang berjudul “Studi Korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pembangunan. Dijelaskan bahwa pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara variabel Indeks Pembangunan Pemuda dengan Indeks Pembangunan Manusia, dan hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah.
 6. Penelitian (A. R. Hakim et al., 2024) yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Kepemudaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kedah”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pemberdayaan. Pemberdayaan kepemudaan adalah

kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, dimana pemuda memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda itu sendiri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan peningkatan ekonomi masyarakat di Kedah sejauh ini belum berhasil dan membutuhkan peninjauan kembali terkait strategi yang digunakan. Hal ini disebabkan pemerataan sosialisasi pemerataan kinerja kepemudaan dan tingginya penolakan terhadap usia muda. Koordinasi kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan kepemudaan di Kedah dengan bantuan dalam bentuk dana dan peluang usaha sejauh ini masih belum berjalan secara efektif.

7. Penelitian (Suyanto, 2018) yang berjudul “Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori strategi pembinaan. Strategi pembinaan kepemudaan merupakan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemuda merupakan kelompok sosial masyarakat yang memiliki potensi kuat untuk mempertahankan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan di kota Samarinda. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan berkaitan standarisasi umur pemuda dan juga ada nya tumpang tindih tugas dan peran antar lembaga dalam pengembangan kepemudaan di Samarinda.

8. Penelitian (Zulkifli et al., 2021) yang berjudul “*Promoting Positive Youth Development: Youth Participation in International Youth Exchange Program*”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pembangunan. Pembangunan pemuda merupakan sebuah gagasan strategis yang berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membantu remaja agar dapat berkembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses seleksi sangat penting untuk memilih generasi muda yang kompeten. Program yang terorganisir dan terstruktur akan berdampak positif pada generasi muda yang berpartisipasi. Apalagi, *Positive Youth Development* (PYD) bisa tercapai dengan meningkatkan program 5Cs PYD.
9. Penelitian (Lindsay et al., 2021) yang berjudul “*Integrating Positive Youth Development: Insights From International Youth Development Programming*”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Positive Youth Development* (PYD). *Positive Youth Development* (PYD) adalah pendekatan berbasis aset yang digunakan oleh banyak praktisi pembangunan pemuda internasional untuk mendukung pengembangan keterampilan kaum muda, memelihara minat dan nilai-nilai mereka, menggabungkan suara dan ide-ide pemuda, dan menghubungkan mereka dengan masyarakat dan sumber daya yang mendukung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan PYD memerlukan waktu, uang, dan upaya terkoordinasi yang signifikan di antara staf program, pemuda, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk menerapkannya.

10. Penelitian (Hutagaol & Tarmizi, 2020) yang berjudul “*The Effect of Youth’s Role in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City*”. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori peran. Dijelaskan bahwa pemuda mempunyai peran sebagai agen perubahan, yaitu pemuda selain mempunyai gagasan atau gagasan yang perlu dikembangkan, juga berperan sebagai perubahan bangsa dan negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemuda berperan sebagai penggerak dinamis, motivator, inovator dan evaluator untuk meningkatkan UMKM di Kota Medan. Peningkatan UMKM di Medan terlihat dari kesejahteraan masyarakat termasuk tingkat lapangan kerja dan pendapatan UMKM.

Tabel 1.2 Teori yang Digunakan Pada Penelitian Terdahulu

Teori	Kebijakan	Pendekatan
Pembangunan	Kebijakan	<i>Positive Youth Development (PYD)</i>
Peran	Politik anggaran	
Pemberdayaan	Strategi dan kebijakan	
Kolaborasi lintas sektor	Strategi pembinaan	

Sumber: (Peneliti, 2025)

Berdasarkan pada kajian literatur/penelitian-penelitian terdahulu di atas, diketahui bahwa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengangkat penelitian tentang pembangunan kepemudaan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kolaborasi yang dilaksanakan oleh lintas sektor PD yang memiliki program kepemudaan. Perbedaan berikutnya yaitu terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan

pada penelitian ini adalah teori kolaborasi lintas sektor yang dikemukakan oleh Bryson *et al.* (2006).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan kajian literatur di atas, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kolaboratif *governance*. Kolaboratif *governance* dalam penelitian ini akan menggunakan teori *collaborative governance* pendapat dari Ansell dan Gash. Menurut Ansell dan Gash *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan “*non-state*” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Astuti et al., 2020). Dalam hal ini, konsep *Collaborative Governance* menjadi salah satu pendekatan utama yang relevan, di mana pemerintahan tidak bekerja sendiri melainkan membangun sinergi dengan aktor non-negara.

Indikator dari teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash adalah kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2007).

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi awal mengacu pada latar belakang sosial-politik dan sejarah hubungan antarpihak sebelum kolaborasi dimulai. Dalam penelitian ini, kondisi awal ditunjukkan melalui pola relasi antara PD di DIY seperti Disdikpora, Bapperida, serta organisasi pemuda dan sektor swasta, sebelum pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan DIY.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan mengacu pada struktur formal, aturan main, serta mekanisme koordinasi yang mengatur proses kolaboratif. Dalam penelitian ini, desain kelembagaan tercermin dari keberadaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam Keputusan Gubernur DIY No. 57/TIM/2024 serta peran RAD (Rencana Aksi Daerah) Pelayanan Kepemudaan DIY yang memberi kerangka kerja formal bagi kolaborasi lintas sektor.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan dalam *Collaborative Governance* bukan bersifat komando, melainkan memfasilitasi. Peran Kepala Disdikpora DIY sebagai ketua Tim Pelaksana serta Bapperida sebagai perencana strategis dianalisis dalam konteks seberapa jauh mereka mampu memfasilitasi kolaborasi antarsektor.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Proses Kolaboratif merupakan inti dari model *Collaborative Governance* yaitu bagaimana interaksi antar aktor berlangsung secara berulang (iteratif) dalam jangka panjang. Penelitian ini akan memetakan dinamika dialog dan koordinasi antar lembaga sebagai wujud dari proses kolaboratif dalam pembangunan kepemudaan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan, mengenai kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema serupa dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda melalui kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan. Sehingga nilai IPP DIY berdasarkan pada domain-domain yang ada dapat terus meningkat, dan pada domain yang nilainya sudah baik dapat tetap dipertahankan agar tetap menjadi IPP yang tertinggi secara nasional.

F. Kerangka Konseptual

Kolaboratif *Government*

Dalam konteks pembangunan kepemudaan, kerangka konsep *governing* berangkat dari pemahaman bahwa tata kelola modern menuntut pergeseran dari pendekatan pemerintah yang hirarkis (*government*) menuju pola kerja kolaboratif dan partisipatif (*governance*). Menurut Rhodes *Governing* didefinisikan sebagai proses di mana berbagai aktor, baik negara, pasar, maupun masyarakat sipil, berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan publik. Dalam hal ini, konsep *Collaborative Governance* menjadi salah satu pendekatan utama yang relevan, di mana pemerintahan tidak bekerja sendiri melainkan membangun sinergi dengan aktor non-negara, seperti organisasi kepemudaan, LSM, komunitas, dan sektor swasta dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan kepemudaan.

Menurut Ansell dan Gash *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku Kepentingan “*non-state*” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Astuti et al., 2020). Edward DeSeve mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas (Astuti et al., 2020).

Agrawal dan Lemos mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya berbatas pada pemangku Kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*”

yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat “*hybrid*” seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial (Astuti et al., 2020). Menurut Lihi Lahat *et al* *collaborative governance* merupakan kegiatan atau strategi dalam ranah publik yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan atau program. Meningkatnya minat terhadap mekanisme *collaborative governance* bersumber dari potensi manfaat melibatkan berbagai aktor untuk menangani masalah kapasitas dan legitimasi pemerintahan. *Collaborative governance* menawarkan strategi tata kelola yang berbeda dari privatisasi dan regulasi, yang telah digunakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah (Noor et al., 2022).

Kolaboratif *government* adalah konsep di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan kemitraan dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, dan penyelesaian masalah bersama, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dalam kerangka teori kolaboratif seperti yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash, kolaborasi dalam pemerintahan melibatkan upaya bersama dalam mengatasi perbedaan kepentingan dan bekerja menuju solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, terutama dalam menangani isu-isu kompleks yang memerlukan keterlibatan multi-sektor.

Kolaborasi Lintas Sektor

Menurut Bryson *et al.* (2006) kolaborasi lintas sektor atau CSC merupakan model yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kolaboratif merupakan dimensi yang penting dan menarik, namun beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan kolaboratif bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak mudahnya disebabkan oleh banyaknya aktor lintas sektor yang harus dilibatkan dalam kolaborasi. Model CSC ini menarik untuk dikaji karena diasumsikan bahwa dalam masyarakat ditemukan berbagai tantangan publik yang kompleks dan perlu diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian literatur, mereka menemukan bahwa perlu kolaboratif lintas sektor dan mengajukan desain model dan implementasinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akibat kondisi masalah publik yang kompleks. Mereka berasumsi bahwa bagaimana organisasi bekerja sama lintas sektor untuk mengatasi masalah publik yang dihadapi (Afrisal, 2022).

Ada dua alasan penting mengapa kolaboratif lintas sektor ini penting yaitu; (1) bahwa efektivitas para partisipan yang terlibat dalam kolaboratif lintas sektor umumnya gagal dalam memainkan peran mereka dalam kolaboratif. Dengan kata lain, organisasi hanya akan berkolaborasi ketika organisasi tersebut tidak mampu mencapai apa yang mereka inginkan tanpa adanya kolaborasi. (2) respon terhadap kolaboratif dianggap hanya sebagai “*holy grail*” (piring antik) ketika mengatasi masalah yang dihadapi dan selalu berhasil. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga (*third party*) ketika memperoleh saran untuk berkolaborasi, meskipun pemerintah sendiri masih ragu dan memiliki sedikit bukti bahwa kondisi tersebut akan berhasil mengatasi masalah (Afrisal, 2022).

Model kolaborasi lintas sektor yang dikembangkan oleh Bryson *et al.* (2006) terdiri dari lima dimensi utama yang saling berinteraksi. Dimensi pertama adalah kondisi awal (*initial conditions*), yang mencakup adanya pengalaman kerja sama sebelumnya, masalah bersama yang dihadapi oleh para pihak, serta kehadiran sponsor atau aktor kunci yang memiliki pengaruh untuk mendorong kolaborasi. Kondisi ini menentukan sejauh mana kolaborasi dapat dimulai dengan dasar kepercayaan dan kebutuhan yang jelas.

Dimensi kedua adalah proses kolaboratif (*collaborative process*), yang merujuk pada dinamika internal selama kolaborasi berlangsung. Proses ini meliputi pembentukan kesepahaman awal, kepemimpinan yang bersifat fasilitatif dan tidak dominatif, pembangunan kepercayaan dan legitimasi antar pihak, pengelolaan konflik secara konstruktif, serta perencanaan yang fleksibel, baik yang dirancang secara formal maupun yang muncul dari dinamika lapangan.

Dimensi ketiga menyangkut struktur dan tata kelola (*structure and governance*), yaitu pengaturan organisasi kolaborasi, mulai dari penetapan tujuan bersama, pembagian tugas yang jelas, penyusunan aturan dan prosedur operasional, hingga pembentukan mekanisme otoritas dan pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Struktur yang adaptif akan memperkuat efektivitas kolaborasi jangka panjang.

Selanjutnya, dimensi keempat adalah kontingensi dan kendala (*contingencies and constraints*), yang mengacu pada faktor-faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi jalannya kolaborasi, seperti ketimpangan kekuasaan antara aktor, logika institusional yang berbeda atau saling bertentangan, serta bentuk kolaborasi itu sendiri (misalnya antara perencanaan sistemik dan kemitraan layanan langsung). Faktor-faktor ini dapat menjadi hambatan atau justru peluang tergantung bagaimana ditangani.

Terakhir, dimensi hasil dan akuntabilitas (*outcomes and accountabilities*) menilai sejauh mana kolaborasi menghasilkan nilai publik, baik dalam bentuk hasil jangka pendek (*output*), menengah (*outcome*), maupun jangka panjang (*impact*). Selain itu, dimensi ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan kapasitas adaptif dari kolaborasi tersebut, termasuk sejauh mana hasilnya dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pembangunan Kepemudaan

Menurut Suyono pembangunan kepemudaan adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk membangun dan mempersiapkan generasi muda agar memiliki kapasitas, integritas, dan daya saing guna berkontribusi dalam pembangunan bangsa secara aktif dan produktif (Suyono, 2005). Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan SDM yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan (Fitriyanti & Pradana, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan (Efendi, 2020).

Pembangunan kepemudaan adalah serangkaian program dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau institusi terkait untuk mendukung pengembangan potensi, kesejahteraan, dan peran aktif pemuda dalam masyarakat. Strategi ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi sosial, kepemimpinan, serta kesetaraan gender, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda

sebagai individu yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan politik negara.

Pembangunan kepemudaan berfokus pada pemberdayaan pemuda, mengakui peran penting mereka sebagai aset bangsa, dan berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Melalui strategi ini, pemerintah bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, memastikan kesehatan fisik dan mental yang optimal, menciptakan kesempatan kerja yang memadai, serta mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kepemimpinan.

Dalam hal ini, terdapat lima domain utama yang menjadi acuan dalam menganalisis dan mengevaluasi efektivitas strategi yang diimplementasikan. Kelima domain ini mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Setiap domain ini memiliki peran penting dan saling terkait dalam membangun kapasitas serta kesejahteraan pemuda, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Domain Pendidikan

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (Hidayat & Abdillah, 2019). Ahmadi dan Uhbiyati mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicitacitakan dan berlangsung terus menerus (Hidayat & Abdillah, 2019). Menurut Carter V.

Good pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial (Citraadin, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 1 dikemukakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Indikator pada domain pendidikan ini yaitu: rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah, dan APK perguruan tinggi (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kepemudaan, karena melalui pendidikanlah pemuda memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan menjadi bekal mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Domain pendidikan dalam strategi pembangunan kepemudaan di Balai Pemuda dan Olahraga DIY menyoroti pentingnya akses terhadap pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal mencakup lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas yang memberikan pendidikan berbasis kurikulum resmi, sementara pendidikan informal melibatkan berbagai kegiatan pengembangan keterampilan yang tidak terikat oleh institusi resmi, seperti pelatihan vokasional, kursus, dan bimbingan keterampilan hidup.

Strategi ini menekankan pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua pemuda, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, pendidikan informal diakui sebagai komponen penting dalam membantu pemuda mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Pengembangan keterampilan melalui pelatihan teknis dan non-teknis menjadi prioritas, dengan tujuan untuk mempersiapkan pemuda menghadapi perubahan cepat dalam ekonomi global yang semakin digital dan berbasis teknologi.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia/ *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan sempurna baik jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial seseorang, tidak hanya terhindar dari penyakit cacat dan kelemahan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sehat tidak hanya absennya penyakit saja melainkan juga suatu kondisi yang baik secara sosial, mental, spiritual dan aspek lainnya (Asyim & Yulianto, 2022). Menurut Sunarti kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Mokalu et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan ini yaitu: angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban

kejahatan, persentase pemuda yang merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

Kesehatan dan kesejahteraan adalah aspek lain yang sangat krusial dalam pembangunan kepemudaan. Dalam strategi ini, perhatian diberikan tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional pemuda. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pemuda yang sehat secara fisik, mental, dan emosional akan lebih mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri.

Program-program kesehatan yang diinisiasi oleh Balai Pemuda dan Olahraga DIY mencakup kampanye kesehatan Pemuda Anti Narkoba, dan pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya dukungan terhadap kesehatan mental, terutama di tengah meningkatnya tekanan sosial dan tantangan kehidupan yang dihadapi pemuda. Penyediaan akses terhadap layanan konseling, pelatihan pengelolaan stres, serta program kesejahteraan mental menjadi bagian integral dalam strategi ini.

Kesejahteraan pemuda juga dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk merasa aman, dihargai, dan memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, strategi ini mendorong terciptanya lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan psikososial pemuda, dengan mengedepankan inklusi sosial, penghapusan stigma, serta dukungan sosial yang memadai.

Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Lapangan pekerjaan merupakan wahana atau sumber pendapatan bagi masyarakat. Tetapi, masalah lapangan pekerjaan tidak dapat disangkal lagi merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan

ekonomi Indonesia. Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan di Indonesia yang sekaligus merupakan upaya meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera (Tyas & Ikhsani, 2015).

Menurut Kairupan kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang, menggambarkan ketersediaan pekerjaan. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja (Suatan et al., 2023). Sagir mengartikan kesempatan kerja sebagai jumlah penduduk atau orang yang bekerja atau yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah di isi, dan kesempatan kerja juga dapat di artikan sebagai partisipasi dalam pembangunan (Suatan et al., 2023). Indikator pada domain lapangan dan kesempatan kerja ini yaitu: pemuda wirausaha kerah putih dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

Lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain yang berperan besar dalam membangun kemandirian ekonomi pemuda. Strategi pembangunan kepemudaan di Balai Pemuda dan Olahraga DIY dalam domain ini berfokus pada pengembangan keterampilan kerja serta akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Pemuda merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran, terutama di masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Oleh karena itu, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemuda dalam mengakses pasar kerja melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, strategi ini juga mendukung pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda, dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan akses terhadap modal usaha bagi mereka yang ingin memulai usaha. Dengan

demikian, strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga untuk mendorong pemuda menjadi pencipta lapangan kerja, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Menurut Pidarta partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Tjokroamidjojo partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan (Hutagalung, 2022).

Menurut Ordway Tead kepemimpinan adalah aktivitas memengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Menurut G.L. Freeman & E.K. Taylor kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok dalam kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut John D. Pfiffner & Robert Presthus kepemimpinan adalah seni mengoordinasi dan memotivasi individu-individu serta kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Mu'ah et al., 2019). Indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan ini yaitu: persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

Partisipasi dan kepemimpinan adalah domain yang bertujuan untuk mendorong pemuda agar aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Strategi ini menyoroti pentingnya menciptakan ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi aktif pemuda dalam organisasi masyarakat, kegiatan sosial, dan forum-forum diskusi dianggap sebagai langkah penting untuk membentuk generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab.

Kepemimpinan juga menjadi fokus utama dalam domain ini. Strategi pembangunan kepemudaan di Balai Pemuda dan Olahraga DIY mencakup program-program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan pemuda melalui pelatihan kepemimpinan, mentoring, dan partisipasi dalam proyek-proyek komunitas. Dengan adanya strategi ini, diharapkan pemuda dapat mengambil peran aktif sebagai agen perubahan yang mampu memimpin inisiatif-inisiatif yang berdampak positif bagi masyarakat.

Domain Gender dan Diskriminasi

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu “*gender*”. Jika merujuk pada kamus bahasa Inggris tidak secara jelas di bedakan antara sex dan gender. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin; laki-laki dan perempuan). Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam pendekatan ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Aan Oakley yang

mengartikan gender sebagai kontruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Suharjuddin, 2020).

Menurut Liliweri diskriminasi adalah suatu variasi atau kategori yang merupakan ancaman yang tidak seimbang terhadap orang lain. Diskriminasi merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki sikap suatu prasangka yang tinggi yang berasal dari tekanan tertentu, contohnya tekanan terhadap suatu adat istiadat, budaya, bahkan kebiasaan dan hukum. Diskriminasi merupakan suatu perilaku yang sangat tidak adil dan tidak serata dengan yang dilakukan dalam membedakan individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau khusus seperti, ras, suku, kelas- kelas sosial bahkan agama (Windar et al., 2022). Indikator pada domain gender dan diskriminasi ini yaitu: angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi, serta persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024).

Domain gender dan diskriminasi menyoroti pentingnya strategi yang berfokus pada kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam pembangunan kepemudaan. Diakui bahwa pemuda, terutama perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta ruang-ruang partisipasi sosial dan politik. Oleh karena itu, strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang setara dan inklusif bagi semua pemuda, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang etnis, agama, atau status sosial mereka.

Upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan diskriminasi bagi para difabel dalam strategi pembangunan kepemudaan yang mencakup pemberian akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan bagi perempuan dan

difabel, serta penyediaan program-program yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi diskriminasi yang mungkin mereka alami. Strategi ini juga mencakup kampanye kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dan hak asasi manusia sebagai landasan dalam pembangunan pemuda yang berkelanjutan.

Dari apa yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepemudaan adalah suatu proses untuk memberikan pelayanan kepada pemuda dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dengan indikator pendidikan, peluang dan kesempatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan, kepemimpinan dan partisipasi serta gender dan diskriminasi.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna (Sugiyono, 2018). Digunakannya jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti hendak mendeskripsikan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan analisis data yang akan digunakan adalah bersifat kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Balai Pemuda dan Olahraga DIY yang beralamat di Ndalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23, Jalan Alun Alun Selatan, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung,

sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Termasuk sumber primer adalah yang berasal “dari tangan pertama”, seperti hasil wawancara (Hardani et al., 2020). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlaku. Termasuk dalam klasifikasi sumber sekunder antara lain buku-buku teks, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya (Hardani et al., 2020). Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan studi dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani et al., 2020). Melalui teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti, yaitu wawancara dilakukan kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat. Tim Pengarah terdiri dari Staf Ahli

Gubernur Bidang Sosbud dan Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY. Tim Pelaksana terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DIY, Alumni Kewirausahaan Pemuda, dan Fatayat NU Kota Yogyakarta. Sekretariat terdiri dari Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, dan PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY. Wawancara ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2025 di Kantor masing-masing dari informan yang diwawancara, dengan materi wawancara terlampir pada Tabel Wawancara 1 sampai dengan Tabel Wawancara 4.

2. Studi dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien (Hardani et al., 2020). Melalui teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dokumen-dokumen terkait, serta bahan-bahan publikasi lainnya.

a. Buku-buku, meliputi:

- 1) Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

- 2) Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- 3) Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance: Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- 4) Citriadin, Y. (2019). *Pengantar Pendidikan*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.
- 5) Hakim, L. M., & Qurbani, I. D. (2021). *Kebijakan Pembangunan Pemuda: Strategi dan Tantangannya*. Media Nusa Creative.
- 6) Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- 7) Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya.”* Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- 8) Hutagalung, S. S. (2022). *Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- 9) Kumara, A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.
- 10) Mu'ah, Indrayani, T. I., Masram, & Sulton, M. (2019). *Kepemimpinan*. Rajawali Pers.
- 11) Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.

- 12) Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
 - 13) Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. CV. Pena Persada.
 - 14) Suyono, H. (2005). *Pemuda dan Pembangunan*. Yayasan Karya Pemuda.
 - 15) Wijaya, H. (2018). *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin)*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- b. Jurnal-jurnal, meliputi:
- 1) Arifin, N. Z. I., Shihab, M. Q., & Hadiyati, S. F. N. (2021). Kebijakan Pengembangan Bidang Kepemudaan Dalam Tata Kelola APBDes (Studi Keberpihakan Pemerintah Desa Kedungturi terhadap Pengembangan Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019). *Jurnal Review Politik*, 11(02), 113–134.
 - 2) Asyim, R. B., & Yulianto. (2022). Perilaku Konsumsi Obat Tradisional Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat Bangsawan Sumenep. *Jurnal Keperawatan*, 15(2), 1–13.
 - 3) Efendi, A. (2020). Studi Korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 9(1), 39–48.
 - 4) Fitriyanti, S., & Pradana, H. A. (2022). Analisis Pembangunan Kepemudaan di Kota Banjarbaru menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (Domain Pendidikan dan Lapangan & Kesempatan Kerja). *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 43–58.

- 5) Hakim, A. R., Hanafi, I., Zulkifli, Z. A., Mardiah, A., & Syahruddin. (2024). Strategi Pemberdayaan Kepemudaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kedah. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–45.
- 6) Hakim, M. A. L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2023). Konstruksi Dasar Masalah Implementasi Kebijakan Kepemudaan Di Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 384–402.
- 7) Hutagaol, S. J., & Tarmizi, H. (2020). The Effect of Youth's Role in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City. *International Journal of Research and Review*, 7(2), 332–343.
- 8) Lindsay, J. E., McGarry, S., Satmukhambetova, A., Raymond, K., Lesheve, A., Jonson, S., Neeno, H., & Williams, C. (2021). Integrating Positive Youth Development: Insights From International Youth Development Programming. *Journal of Youth Development*, 16(2–3), 55–73.
- 9) Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–12.
- 10) Rifano, A. T. S. (2021). Rifano 2021. WASKITA: *Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 5(1), 73–75.

- 11) Suatan, A. C. M., Naukoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmih Efisiensi*, 23(4), 73–84.
 - 12) Sudirman, I., Aminawar, M., Alam, A. S., Sakharina, I. K., Darwis, M., & Kurniawan, M. E. (2018). Kajian Strategi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Bangda Simpurusiang*, 01(01), 61–79.
 - 13) Suyanto. (2018). Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomika*, 7(1), 48–57.
 - 14) Tyas, A. A. W. P., & Ikhsani, K. T. W. (2015). Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Forum Ilmiah*, 12(1), 1–15.
 - 15) Windar, Wahidin, A., & Rasyid, A. (2022). Diskriminasi Keagamaan dan Kebudayaan terhadap Masyarakat Digital. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 99–108.
 - 16) Zulkifli, F., Arshad, M. M., Ismail, I. A., Abdullah, H., & Zulkefli, M. Y. (2021). Promoting Positive Youth Development: Youth Participation in International Youth Exchange Program. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(19), 26–43.
- c. Artikel, meliputi:
- 1) Admin Warta. (2023). *Pemuda Yogya Diminta Jadi Agen Perubahan Positif dan Produktif*. <Https://Warta.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/30468/Pemuda->

- Yogya-Diminta-Jadi-Agen-Perubahan-Positif-Dan-
Produktif-2023-11-25?Utm_source=chatgpt.Com.
- 2) Cakra Wikara Indonesia. (2022). *Validity: Validitas Dalam Penelitian Kualitatif.* <Https://Cakrawikara.Id/Wp-Content/Uploads/2022/03/25-Feb-2022-Validitas-Kualitatif.Pdf>.
 - 3) Deni. (2024). *Pemuda Kota Yogyakarta Berinteraksi, Berkolaborasi, Berpartisipasi.* Https://Radiostar.Harianjogja.Com/2024/07/05/Pemuda-Kota-Yogyakarta-Berinteraksi-Berkolaborasi-Berpartisipasi/?Utm_source=chatgpt.Com.
 - 4) Natalia, M. D. (2024). *Fasilitas Pemerintah: Pemuda DIY Bisa Manfaatkan Program Kepemudaan.* Https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2024/05/17/510/1174864/Fasilitas-Pemerintah-Pemuda-Diy-Bisa-Manfaatkan-Program-Kepemudaan?Utm_source=chatgpt.Com.
- d. Dokumen-dokumen terkait, yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY serta internet, meliputi:
- 1) Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY. (2018). *Struktur Organisasi Balai Pemuda Dan Olahraga.* <Https://Bpo-Diy.or.Id/Profil/>.
 - 2) Dinas Dikpora. (2021). *Rancangan Akhir Renstra 2022-2027: Rencana Strategis.* Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
 - 3) Dinas Dikpora DIY. (2023). *RENJA: Rencana Kerja 2024.* Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

- 4) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027.*
 - 5) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 / TIM / 2024 Tentang Pembentukan Tiim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*
 - 6) Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2024). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2024.* Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - 7) Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Indeks Pembangunan Pemuda 2021.* Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
- e. Bahan-bahan publikasi lainnya, meliputi:
- 1) Afrisal, A. F. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)* [Disertasi]. Universitas Hasanuddin.

E. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi lebih banyak tentang orang lain dan hal yang berkaitan dengannya dari pada tentang dirinya (Abdussamad, 2021). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informannya. Menurut Notoatmodjo teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan tertentu, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi (Kumara, 2018). Pertimbangan pengambilan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan memiliki kompetensi dan menguasai akan permasalahan yang diangkat peneliti.
2. Informan dapat memberikan jawaban secara objektif.

Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud, Dr. Didik Wardaya, SE, M.Pd. Alasannya karena memahami perencanaan dan kebijakan pembangunan kepemudaan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 1.

Nama	:	Dr. Didik Wardaya, SE, M.Pd
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Usia	:	69 Tahun
Pekerjaan	:	Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud
Masa Kerja	:	Dua bulan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Dikpora DIY sampai dengan bulan Februari 2025
Organisasi	:	Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud

- b. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Ari Siswo Putro. Alasannya karena memahami perencanaan dan kebijakan pembangunan kepemudaan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 1.

Nama : Ari Siswo Putro
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 43 Tahun
Pekerjaan : Perencana Ahli Muda
Masa Kerja : 14 Tahun
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY

2. Tim Pelaksana

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Drs. Suhirman, M.Pd. Alasannya karena sebagai instansi utama yang bertanggung jawab atas program kepemudaan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 1.

Nama : Drs. Suhirman, M.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 59 Tahun
Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY
Masa Kerja : Dua bulan sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Dikpora DIY
Organisasi : Disdikpora DIY

- b. Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof. Guntur. Alasannya karena akademisi banyak melakukan penelitian-

penelitian, yang dalam hal ini adalah penelitian tentang studi kepemudaan atau kebijakan publik. Sehingga akademisi sering bertindak sebagai sumber pengetahuan ilmiah dan data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 2.

Nama : Prof. Dr. Guntur.M.Pd

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 43 Tahun

Pekerjaan : Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Masa Kerja : 17 tahun 6 bulan

Organisasi : UNY

- c. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DIY, Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY, Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom. Alasannya karena sebagai salah satu lembaga yang diikuti pemuda beregrak dibidang kewirausahaan pemuda. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 4.

Nama : Anjar Prihatanto Pamilih, S. Kom

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 29 tahun

Pekerjaan : Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY

Masa Kerja : 3 tahun

Organisasi : HIPMI DIY

d. Alumni Kewirausahaan Pemuda, Fahmi Nur Priambudi. Alasannya karena sebagai lembaga binaan langsung yang menaungi organisasi kewirausahaan kepemudaan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 4.

Nama : Fahmi Nur Priambudi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 24 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Masa Kerja : 2 tahun

Organisasi : Alumni Kewirausahaan Pemuda

e. Fatayat NU Kota Yogyakarta, Vina Rohmatul Ummah. Alasannya karena sebagai perwakilan dari organisasi kepemudaan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 4.

Nama : Vina Rohmatul Ummah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Masa Kerja : 5 tahun

Organisasi : Fatayat NU Kota Yogyakarta

3. Sekretariat

a. Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, Drs. Priya Santosa, M.M.yang purna tanggal 1 Februari 2025 dan kemudian diganti Plt. Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Eng. masa kerja 15 Februari sampai saat ini. Alasannya karena sebagai unit pelaksana teknis dinas di bidang kepemudaan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 1.

Nama : Drs. Priya Santosa

- Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 58 Tahun
Pekerjaan : Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO)
DIY
Masa Kerja : Kepala BPO Dinas Dikpora DIY dari tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2025
Organisasi : BPO Dinas Dikpora DIY (Purna Tugas)
- b. PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd. Alasannya karena sebagai unit pelaksana teknis dinas di bidang kepemudaan. Pertanyaannya ada pada Tabel Wawancara 3.
- Nama : Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Masa Kerja : Februari 2025 sampai dengan sekarang
Organisasi : BPO Dinas Dikpora DIY

F. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian kualitatif ada empat, yaitu:

1. Uji Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi (Sugiyono, 2018). Menurut (Wijaya, 2018) triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan kenyataan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono, 2018). Pada *transferability* ini pengambil data dilakukan berulang, selanjutnya mereduksi data, dan penyajian (*display*) data dalam bentuk tabel/bagan.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability* (Sugiyono, 2018). Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara fakta yang terjadi dilapangan dengan data yg dilaporkan peneliti.

4. Uji Kepastian (*Conformability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang (Sugiyono, 2018). *Confirmability* dilakukan dengan menguji hasil penelitian melalui seminar, *workshop*, jurnal, dan lain-lain.

Teknik validasi data atau uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber

data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Karena pada penelitian ini peneliti memperoleh data dari berbagai sumber, sehingga digunakan triangulasi sumber.

Pada penelitian ini, teknik validasi-validasi ini belum memungkinkan dilakukan oleh peneliti dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti serta narasumber (Cakra Wikara Indonesia, 2022), sehingga digunakanlah teknik triangulasi.

Beberapa kelebihan dari teknik triangulasi dibandingkan dengan teknik lainnya diantaranya adalah (Arianto, 2024):

1. Peningkatan validitas dan keandalan data

Salah satu keunggulan utama dari triangulasi adalah kemampuannya untuk meningkatkan validitas dan keandalan data. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau menggunakan berbagai metode, peneliti dapat memverifikasi temuan peneliti. Ketika hasil dari satu metode atau sumber data konsisten dengan hasil dari yang lain, hal ini memberikan kepercayaan lebih terhadap keakuratan informasi yang diperoleh.

2. Pemahaman yang lebih komprehensif

Triangulasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif, peneliti dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, yang dapat menghasilkan wawasan yang lebih holistik. Hal ini sangat bermanfaat dalam penelitian sosial, sehingga kompleksitas manusia dan interaksi sosial sering kali sulit untuk dipahami hanya dari satu perspektif.

3. Mengurangi bias

Menurut Rahardjo dengan menggunakan berbagai sumber dan metode, triangulasi dapat membantu mengurangi bias yang mungkin timbul dari satu metode atau sumber tertentu. Sebagai contoh, jika satu sumber data menunjukkan hasil yang berbeda dari yang lain, peneliti dapat lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan dan mengeksplorasi kemungkinan bias dalam pengumpulan data.

4. Fleksibilitas metodologis

Triangulasi memberikan fleksibilitas metodologis kepada peneliti. Peneliti dapat memilih metode dan sumber data yang paling sesuai dengan konteks penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk beradaptasi dengan perubahan situasi lapangan dan menghasilkan penelitian yang lebih relevan dan aplikatif.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman pada analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif ini menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan, yaitu (Hardani et al., 2020):

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian

singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Data yang telah melewati proses reduksi selanjutnya akan disajikan dalam laporan penelitian berupa deskripsi uraian kata-kata dalam bentuk teks naratif. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

Digunakannya analisis data kualitatif pada penelitian ini dikarenakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Selain itu, pengumpulan data salah satunya menggunakan wawancara, dimana data yang muncul adalah berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Sehingga pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY

1. Profil

Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY yang menangani bidang Pemuda dan Olahraga di Provinsi DIY.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh BPO diantaranya:

- a. Kegiatan Kepemudaan
 - 1) Pelatihan PASKIBRAKA DIY.
 - 2) Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda.
 - 3) Pembinaan Inovasi Bisnis.
 - 4) Lomba Inovasi Bisnis.
 - 5) Jambore Pemuda DIY.
 - 6) Bakti Sosial Pemuda DIY.
 - 7) Pelatihan Pemuda Relawan Tanggap Bencana.
 - 8) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
 - 9) Pelatihan Sentra Kewirausahaan Pemuda
 - 10) Pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba
 - 11) Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara, Pelatihan Kepemimpinan Pemuda, Pelatihan Kader

Bela Negara, Pasangan Muda Inspirasi, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Pelopor.

12) Beasiswa Berkelanjutan Bagi Pemuda dan Beasiswa Pendidikan Tinggi Istimewa

b. Kegiatan Keolahragaan

- 1) Pembinaan Atlet Berbakat.
- 2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP).
- 3) Tri Lomba Juang.
- 4) Pekan Olahraga Pelajar DIY.

2. Visi

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.

3. Misi

Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing melalui Pendidikan.

4. Tujuan

Terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas.

5. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar III.1 Struktur Organisasi Balai Pemuda dan Olahraga (BPO)

Sumber: (Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, 2018)

6. Tugas

Regulasi yang mengatur tugas dan fungsi BPO yaitu diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.

Pada Pasal 14 ayat (1) dikemukakan bahwa BPO mempunyai tugas sebagai unit pelaksana teknis dinas di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan jumlah pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan dan jumlah medali dalam kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Wilayah dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Selanjutnya pada ayat (2) dikemukakan bahwa Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Balai Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Balai Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pemuda dan Olahraga; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

B. Gambaran Koordinasi Lintas Sektor

Tim koordinasi lintas sektor kepemudaan di DIY, diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY. Pada Keputusan Gubernur yang selanjutnya disebut Kepgub ini dikemukakan bahwa tim koordinasi lintas sektor kepemudaan DIY terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Adapun Tim Pelaksana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Berikut adalah personil Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.

Tabel 3.1 Tim Pengarah

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Ketua	Wakil Gubernur DIY.
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah DIY. 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY. 3. Paniradya Pati Kaistimewan DIY. 4. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY. 5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY. 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY

Tabel 3.2 Tim Pelaksana

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Ketua	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
2.	Anggota	1. Unsur Dinas Kesehatan DIY 2. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY 3. Unsur Dinas Sosial DIY 4. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 5. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY 6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 7. Unsur Balai Latihan Kerja DIY

	<ul style="list-style-type: none"> 8. Unsur Kepolisian Daerah DIY 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja DIY 10. Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana DIY 11. Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY 12. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 13. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta 14. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 15. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul 16. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo 17. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 18. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 19. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman 20. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 21. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulonprogo 22. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul 23. Unsur Universitas Negeri Yogyakarta 24. Unsur Universitas Gadjah Mada 25. Unsur Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta 26. Unsur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Yogyakarta 27. Unsur Komite Nasional Pemuda Indonesia DIY
--	---

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan DIY

Tabel 3.3 Sekretariat

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Ketua	Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbag Umum Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 2. Staf Subbag Umum Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 3. Staf Seksi Pemuda Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2024 Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan DIY

Selanjutnya mengenai gambaran koordinasi lintas sektor, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Domain Pendidikan

Koordinasi Lintas Sektor / PD	Domain IPP / Bentuk Koordinasi	Indikator IPP	Koordinator PD / Pelaksana
Program sinergis antarsektor dalam hal Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda	Domain pendidikan: 1. Rata-rata lama sekolah pemuda. 2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah pemuda. 3. Angka partisipasi kasar perguruan. Bentuk koordinasi: 1. Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui Pendidikan. 2. Peningkatan penyadaran Pemuda melalui Pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan karakter kebangsaan.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun. Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTS) sederajat. Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) sederajat. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi.	Dikpora DIY dan Dikpora Kabupaten/Kota Dikpora DIY dan Dikpora Kabupaten/Kota. Dikpora Provinsi, Perusahaan, Masyarakat.
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk	Pemda DIY & Perguruan Tinggi di DIY serta berbagai pemangku kepentingan lain.
			Dikpora provinsi.

	<p>3. Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.</p>	Usia tahun 4-18 disabilitas.	
--	--	------------------------------	--

Sumber : Pergub Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah
Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027

Tabel 3.5 Domain Kepemimpinan dan Partisipasi Pemuda

Koordinasi Lintas Sektor / PD	Domain IPP / Bentuk Koordinasi	Indikator IPP	Koordinator PD / Pelaksana
Program sinergis antarsektor dalam hal Pengembangan Kepemimpinan & Kepeloporan Pemuda	Bentuk Koordinasi: Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan.	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan.	Dikpora DIY (BPO), Kesbangpol, Biro Bermas, Dinas Sosial DIY.

Sumber : Pergub Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah
Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027

Tabel 3.6 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Koordinasi Lintas Sektor / PD	Domain IPP / Bentuk Koordinasi	Indikator IPP	Koordinator PD / Pelaksana
Program sinergis antarsektor dalam hal Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Domain kesempatan dan lapangan kerja: 1. Pemuda wirausaha kerah putih. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda.	Disnakertrans, Disdikpora, Perguruan tinggi, dan Diskominfo.
	Bentuk Koordinasi: Peningkatan daya saing wirausaha pemuda	Pemuda bekerja.	Disnakertrans, Disdikpora, dan Perguruan Tinggi.
		Kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha.	Disdikpora, Diskop UMKM, Disnakertrans, dan Diskominfo.
		Kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	Disdikpora, Diskop UMKM, Disnakertrans, dan Diskominfo.

Sumber : Pergub Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah

Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027

Tabel 3.7 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Koordinasi Lintas Sektor / PD	Domain IPP / Bentuk Koordinasi	Indikator IPP	Koordinator PD / Pelaksana
Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran Pemuda	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: 1. Angka kesakitan pada pemuda. 2. Perilaku merokok pada pemuda. 3. Kehamilan pemuda. 4. Angka kejahatan pada pemuda. Bentuk koordinasi: 1. Peningkatan layanan untuk menurunkan angka kesakitan pada pemuda. 2. Peningkatan layanan untuk mengurangi perilaku merokok. 3. Peningkatan partisipasi kelompok usia produktif untuk mencegah kehamilan di usia remaja. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencegah kejahatan baik menjadi pelaku maupun korban.	Terpenuhinya pelayanan Kesehatan UKP dan UKM. Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan.	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY.
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular).	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja.
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif.	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan.
		Persentase perempuan korban	Bappeda DIY, Dinas Kesehatan

	<p>5. Peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, <i>human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome</i>, dan perdagangan manusia.</p> <p>6. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial.</p> <p>7. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>8. Peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental.</p> <p>9. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika.</p>	kekerasan yang dilayani.	DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepolisian Daerah DIY.
--	--	--------------------------	---

Sumber : Pergub Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah

Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027

Tabel 3.8 Domain Gender dan Diskriminasi

Koordinasi Lintas Sektor / PD	Domain IPP / Bentuk Koordinasi	Indikator IPP	Koordinator PD / Pelaksana
Program Penyadaran, Pemberdayaan, serta Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda	<p>Domain Gender dan Diskriminasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan Usia Anak. 2. Partisipasi pemuda perempuan di pendidikan menengah dan tinggi. 3. Perempuan bekerja. <p>Bentuk Koordinasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i>, dan perdagangan manusia. 2. Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan 	<p>Persentase pemuda perempuan berusia 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20-24 tahun (persen / %).</p> <p>Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi (persen / %).</p> <p>Persentase Pemuda perempuan berusia 16-30 tahun yang bekerja di</p>	DP3AP2, BKKBN, Dinas Kesehatan, Dikpora (BPO), Kemenag Kanwil DIY, Dinsos.

	<p>kualitas moral dan konflik sosial.</p> <p>3. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan.</p>	<p>sektor formal (persen / %).</p>	
--	---	------------------------------------	--

Sumber : Pergub Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah

Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2027

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kolaboratif *Government* Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembangunan kepemudaan merupakan aspek strategis dalam menciptakan generasi yang berdaya saing, inovatif, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Di DIY, kolaboratif *government* menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam pengelolaan dan pengembangan program kepemudaan. Menurut Ansell dan Gash *collaborative governance* merupakan pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga publik maupun aktor non-pemerintah, dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan secara formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus (Astuti et al., 2020). Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor dalam mengelola kebijakan dan program publik guna meningkatkan efektivitas serta legitimasi pemerintahan. Edward DeSeve memperluas konsep ini dengan mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sistem yang terintegrasi melalui pengelolaan hubungan di luar batas organisasi formal dan informal. Sistem ini mengadopsi prinsip organisasi yang fleksibel dan memiliki parameter keberhasilan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama (Astuti et al., 2020). Meningkatnya minat terhadap mekanisme *collaborative governance* didorong oleh kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai tantangan pemerintahan, terutama terkait kapasitas dan legitimasi kebijakan publik. Berbeda dari strategi privatisasi dan regulasi, *collaborative governance* menawarkan pendekatan tata kelola yang lebih inklusif, di mana

keterlibatan multiaktor menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan (Noor et al., 2022).

Realitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa konsep *collaborative governance* telah diterapkan dalam berbagai aspek pembangunan kepemudaan.

Tabel 4.1 Jumlah Pemuda Peserta Kegiatan Di Setiap PD DIY

PD	Tahun			Jumlah
	2023	2024	2025	
Polda DIY	680	680	680	2.040
BLK&PP	411	497	110	1.018
Bina Mental Spiritual	50	50		100
Tata Pemerintahan Setda	677	1.526		2.203
BKKBN	230	1.180		1.410
BNNP		35.775		35.775
Kebudayaan	1.647	1.478	1.280	4.405
Kesehatan	120	326		446
Kominfo		30	30	60
Kop & UMKM	100	340	80	520
Pariwisata	335	70	100	505
Perpustakaan dan kerasipan	3.235	41.202	1.500	45.937
Pertanian & Ketahanan Pangan	25			25
Tenaga Kerja & Transmigrasi	1.401	1.412	1.965	4.778
DP3AP2	5.462	43.446	2.990	51.898
Kesbangpol	6.680	4.221	4.253	15.154

Sumber: Arsip Pemda DIY

Berdasarkan data jumlah peserta kegiatan per PD DIY selama tahun 2023 hingga 2025, terlihat bahwa pelibatan pemuda dalam berbagai program mengalami dinamika yang mencerminkan variasi pendekatan kolaboratif antar-PD. Beberapa perangkat daerah menunjukkan konsistensi dan intensitas tinggi dalam melibatkan pemuda, sedangkan sebagian lainnya cenderung sporadis atau bahkan tidak terlibat dalam periode tertentu.

DP3AP2 menempati posisi tertinggi dalam hal jumlah peserta, dengan total 51.898 orang selama tiga tahun. Ini mengindikasikan bahwa DP3AP2 sangat aktif menjalankan kegiatan yang menyasar kelompok pemuda, baik dalam konteks pemberdayaan maupun sosialisasi kebijakan keluarga dan kependudukan. Hal serupa juga tercermin dari Perpustakaan dan Kearsipan, yang secara konsisten mengikutsertakan pemuda, dengan lonjakan besar pada tahun 2024 mencapai 41.202 peserta, dan total keseluruhan mencapai 45.937 orang. Ini menunjukkan adanya inovasi atau ekspansi program literasi atau teknologi berbasis komunitas yang melibatkan pemuda secara masif.

Sementara itu, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) juga menunjukkan angka tinggi di tahun 2024 dengan 35.775 peserta, meski absen di tahun lainnya. Hal ini mungkin mencerminkan adanya program kampanye anti-narkoba besar-besaran atau agenda nasional yang difokuskan pada satu tahun tertentu. PD lain seperti Kesbangpol (15.154), Tenaga Kerja & Transmigrasi (4.778), dan Dinas Kebudayaan (4.405) juga tergolong aktif dan konsisten menyertakan pemuda. Ini menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti wawasan kebangsaan, ketenagakerjaan, dan budaya masih menjadi ladang strategis pelibatan generasi muda DIY.

Namun di sisi lain, terdapat PD yang tingkat partisipasi pemudanya tergolong rendah atau bahkan nihil pada tahun-tahun tertentu. Contohnya seperti Pertanian dan Ketahanan Pangan yang hanya mencatat 25 peserta di tahun 2023, dan tidak ada pada dua tahun berikutnya. Hal ini membuka ruang evaluasi terhadap bagaimana sektor pertanian dapat mulai melibatkan generasi muda secara lebih sistematis ke depan.

Total akumulasi peserta dari seluruh PD mencapai lebih dari 166 ribu orang dalam tiga tahun, mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan institusional dalam mendorong keterlibatan pemuda. Namun untuk mencapai

pendekatan Collaborative Government yang optimal, perlu ada perencanaan lintas sektor dan kesinambungan program agar keterlibatan pemuda menjadi strategi bersama, bukan inisiatif sektoral yang terputus-putus.

Tabel 4.2 Jumlah PD DIY yang mengikutsertakan Pemuda

Tahun	Jumlah PD yang Mengikutsertakan Pemuda	Total Peserta Pemuda
2023	14 PD	19.453
2024	15 PD	101.473
2025	8 PD	11.938

Sumber: Arsip Pemda DIY

Berdasarkan data jumlah peserta kegiatan yang dihimpun dari berbagai PD DIY selama periode 2023 hingga 2025, keterlibatan pemuda dalam program-program lintas sektor mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, tercatat ada 14 PD yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pemuda dengan total peserta mencapai 19.453 orang. Aktivitas kolaboratif ini meningkat tajam di tahun 2024, baik dari segi jumlah PD yang terlibat (15 PD) maupun dari total peserta yang melonjak drastis menjadi 101.473 orang, didorong terutama oleh kegiatan masif dari PD seperti BNNP, DP3AP2, dan Perpustakaan & Kearsipan. Namun, pada tahun 2025, partisipasi mengalami penurunan tajam, baik dalam hal jumlah perangkat daerah (hanya 8 PD) maupun jumlah peserta, yang turun menjadi 11.938 orang. Penurunan ini mencerminkan tantangan kesinambungan kolaborasi dan perlunya strategi penguatan partisipasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Dalam sesi wawancara, Dr. Didik Wardaya, SE., M.Pd., Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Budaya, mengatakan:

“Kolaborasi pemerintah telah berjalan melalui Organisasi Perangkat Daerah (PD) dengan teknis menyusun program bersama aspirasi, top down dan bottom up dari aspirasi pemuda, dalam rangka

meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Skala prioritas dari bidang kesehatan, kepemimpinan, pendidikan.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Sementara itu Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY menyatakan pandangannya sebagai berikut:

“Kolaboratif lintas sektor pembangunan kepemudaan mengacu pada perda tentang pelayanan kepemudaan dan RAD kepemudaan seperti UU, Perpres pembangunan kepemudaan tentang penyaliran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Regulator, membuat kerangka kebijakan peraturan, RAD melibatkan biro kesra. Fasilitator, oleh BPO, Dinas Koperasi punya inkubasi bisnis menyarai pemuda, dinas naker untuk menjembatani, organisasi pemuda sebagai wadahnya, pramuka, kebencanaan. Dunia usaha, akademisi untuk pengembangan kepemudaan masyarakat dari organisasi di desa karang taruna yang harus bersama dikolaborasikan di satukan dalam bentuk kegiatan yang terkoordinasi.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY mengatakan:

“Kolaboratif lintas sektor sudah terkoordinasi dari instruksi pemda DIY, sudah terbiasa bekerjasama dengan teman-teman pemuda dan CSR kerjasama non formal, aktivitas pemuda banyak yang membantu kegiatan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Prof. Guntur Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta dalam wawancara juga menyatakan bahwa:

“Kolaboratif lintas sektor di UNY sudah berjalan meski belum maksimal. Mahasiswa dari DIY mereka sebagian besar representasi dari Kab/Kota di DIY dan memiliki background kepengurusan kepemudaan baik tingkat dusun sampai dengan tingkat Kabupaten, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan.” (Wawancara, 20 Februari 2025)

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 menyatakan:

“Kolaboratif mendasarkan Perpres 43 Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Tim Koordinasi lintas sektor. Tim akan berbagi sesuai

dengan ranahnya masing-masing. Bagaimana meningkatkan 5 Domain besar IPP sehingga koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara maksimal. Proses berawal dari membuat tim berbagi sesuai ranah masing-masing. Fokus meningkatkan IPP.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sedangkan Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY mengatakan:

“Kolaborasi saat ini sudah berjalan tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki, khususnya menyangkut besaran pemuda terlibat dalam kegiatan serta data peserta program kegiatan di masing-masing PD.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan melalui berbagai instansi dan regulasi, namun masih menghadapi tantangan dalam efektivitas dan optimalisasi. Program kepemudaan dirancang dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, mengakomodasi aspirasi pemuda untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di bidang kesehatan, kepemimpinan, dan pendidikan. Regulasi dan kebijakan telah memberikan kerangka koordinasi lintas sektor, melibatkan regulator, fasilitator, dunia usaha, akademisi, serta organisasi kepemudaan di berbagai tingkatan. Meskipun telah ada sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan keterlibatan pemuda, serta memperbaiki sistem pendataan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang dijalankan.

Menurut Bryson *et al.* (2006), kolaborasi lintas sektor merupakan dimensi penting dalam tata kelola, namun pelaksanaannya tidak selalu mudah. Efektivitas kolaborasi sering kali terganjal oleh kegagalan partisipan dalam menjalankan peran mereka, di mana organisasi hanya berkolaborasi jika tidak mampu mencapai tujuannya sendiri. Selain itu, kolaborasi kerap

diangap sebagai solusi ideal (*holy grail*), meskipun pemerintah sering kali ragu dan memiliki sedikit bukti keberhasilannya sebelum benar-benar menerapkannya (Afrisal, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa kenyataan dilapangan efektifitas kolaborasi goverbment di DIY cukup baik. Hal itu terlihat berdasarkan hasil wawancara Dr. Didik Wardaya, SE, M.Pd. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud mengatakan:

“Konteks Dikpora sebagai PD yang membidangi kepemudaan sebagai koodinator yang membidangi langsung, Disdikpora bisa menjembati untuk kerjasama. Terkait gender maka berkerjasama dengan DP3AP2, Tanggap bencana bekerjasama dengan Dinsos supaya target dalam domain IPP menjadi lebih mudah, saatnya pembangunan dilaksanakan dengan kolaborasi. Termasuk domain kesehatan dengan Dinkes budaya anti rokok, bnnp, kepolisian, menekan korban kejahanatan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan dengan Pol PP.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY juga mengatakan:

“Kolaborasi sudah menjadi hal biasa dengan sesama PD, Organisasi kepemudaan dan sektor diluar itu.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Prof. Guntur Rektor III UNY menyatakan pendapatnya:

“Kemahasiswaan memiliki program yang berkaitan dengan kewirasahaan di masyarakat. Programnya kewirausahaan dan pemuda. Ada bantuan modal untuk dikembangkan di daerah misalnya karang taruna: kuliner, bikin janur/ketupat berdasar budaya kearifan lokal. Mahasiswa sebagai gardanya. Kewirausahaan pemuda di Kemristek Dikti. Program pengabdian organisasi mahasiswa kepada masyarakat di Indonesia bergulir didaerah terluar dan tertinggal, KKN Kebangsaan di daerah 3T. Kolaborasi bisa terwujudnya program kewirausahaan dikampus UNY yang melibatkan pemuda di wilayah setempat melalui UKM. UNY punya Program Kampung Emas sebagai desa binaan. Tatanan dalam sinergi DIY ada kampus atau pemerintah, kampung emas plumpungan GK, kampung wisata. Mahasiswa memberikan bimbingan pelatihan seni budaya. Tri Darma perguruan tinggi pendidikan, pengabdian, penelitian, pelatihan

kewirusahaan, sosialisasi perilaku hidup sehat posyandu balita dan lansia.” (Wawancara, 20 Februari 2025)

Drs. Priya Santosa, M.M. Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 mengatakan:

“Sebagai suatu proses, belum maksimal mengintervensi mengajak pemuda dalam kegiatan. Perlu penguatan kepada PD untuk mengikutsertakan pemuda dalam pembangunan pemuda. Dalam domain IPP perlu intvensi agar kegiatan mengikutsertakan pemuda. Misalnya pendidikan diberikan beasiswa berkelanjutan bagi pemuda.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY juga mengatakan bahwa:

“Ada peran instansi Bapperida yakni melakukan monev, evaluasi program dijalankan apakah pihak-pihak terlibat sudah tahu peran masing-masing. Sehingga Baperrida bisa menjembatani kerjasama lintas sektor tersebut. Pencermatan rencana aksi, Mendanai kegiatan yang dilaksanakan di PD meskipun tidak spesifik kegiatan di khususkan untuk pemuda, Mendorong mitra untuk bekerjasama dengan lintas PD sehingga bisa menyasar ke pelayanan kepemudaan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY mengungkapkan:

“HIPMI DIY berperan sebagai wadah bagi pengusaha muda untuk mengembangkan usaha, membangun jejaring bisnis, serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Kami juga aktif dalam advokasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengusaha muda serta memfasilitasi akses modal dan peluang investasi bagi anggota. Program yg bisa kami tawarkan yaitu perencanaan bisnis (Business Plan) bagi pemuda yang ingin memulai usaha, Pendampingan legalitas Bisnis, edukasi perihal Perizinan dan Hukum Bisnis, Literasi perencanaan keuangan dan perpajakan dan Literasi tentang produk & digital marketing.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda mengatakan:

“Organisasi kami berperan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda di DIY melalui pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kami juga memfasilitasi sertifikasi produk, penguatan jaringan bisnis, serta kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas untuk menciptakan ekosistem wirausaha muda yang berkelanjutan.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Vina Rohmatul Ummah Mahasiswi Fatayat NU Kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa:

“Peran kami meningkatkan Kualitas SDM Perempuan, baik soft skill maupun hard skill khususnya di Kota Yogyakarta dengan menyelenggarakan program atau kegiatan di bidang sosial, keagamaan, budaya, lingkungan, Kesehatan, maupun bidang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun perkembangan zaman.” (Wawancara, 23 Februari 2025)

Sedangkan Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY menyatakan bahwa:

“Peran BPO menjadi penggerak dari kerjasama lintas PD ini karena adanya regulasi Perpres 43 Tahun 2022 tentang kerjasama lintas sektor.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Kolaborasi lintas sektor di DIY menunjukkan efektivitas yang cukup baik, terutama dalam sinergi antar PD, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Disdikpora berperan sebagai koordinator dalam berbagai program, termasuk kepemudaan, gender, dan tanggap bencana, dengan menggandeng instansi terkait. Perguruan tinggi turut serta melalui program kewirausahaan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat, sementara Bapperida melakukan evaluasi dan mendorong keterlibatan lintas PD dalam program kepemudaan. Sektor UMKM dan wirausaha pemuda juga berkembang melalui pendampingan, akses modal, dan literasi bisnis. Selain

itu, berbagai organisasi turut meningkatkan kualitas SDM, khususnya perempuan, melalui pelatihan dan program sosial. Regulasi yang ada menjadi dasar penggerak kolaborasi ini, meskipun masih diperlukan penguatan dalam mengikutsertakan pemuda secara lebih maksimal dalam pembangunan daerah.

Mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda dan sektor lain dalam kolaborasi di DIY berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Didik Wardaya, SE, M.Pd Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud mengatakan:

“Komunikasi meningkatkan peran dari organisasi kepemudaan, organisasi sozial, kepramukaan. Membangun sesuai fokus program , komunikasi timbal balik.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY menyatakan:

“Koordinasi lintas sektor bersama-sama dengan PD dan TAPD sebagai fasilitator akan banyak bekerjasama dengan BPO, Kesra sebagai upaya memaksimalkan forum kepemudaan untuk menghubungkan issue kemiskinan, program di Bapperinda sebg sekretariat PLST forum pelaksana koordinasi dunia usaha (CSR), yang bisa melibatkan pemuda. Aplikasi sinangkis yang bisa dikerjasamakan dengan PD, CSR, dan Masyarakat yang berhubungan dengan pelatihan pemuda dikantong kemiskinan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY juga mengatakan:

“Komunikasi dengan bersurat , sehingga jelas PD membantu apa. BK3S Sekolah2 d hubungi untuk tes kebugaran. Bantuan anak2 putus sekolah.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Prof. Guntur Rektor III UNY menyatakan:

“Mahasiswa berkolaborasi dengan KONI komunikasi di UKM , PMI korps sukarela, kepramukaan.” (Wawancara, 20 Februari 2025)

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 mengatakan:

“Dalam kolaborasi tidak hanya dengan PD tetapi semua pihak yang sekiranya dapat membantu dalam meningkatkan domain IPP. Kita rangkul bersama secara program memang ada tata kala mekanisme kolaborasi selama ini dengan pertemuan. Kebersamaan koordinasi tanpa melihat anggaran yang ada, pemuda terinformasikan program kegiatannya.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY menyatakan:

“Komunikasi selama ini sudah berjalan tetapi belum maksimal sehingga dampaknya juga belum signifikan terhadap pembangunan dan fasilitasi pemuda.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY mengungkapkan:

“HIPMI DIY sering dilibatkan dalam berbagai forum diskusi dan kebijakan ekonomi daerah, termasuk dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, program kemitraan dengan BUMN/BUMD, serta evaluasi efektivitas program dukungan bagi pengusaha muda.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda mengatakan:

“Organisasi kami dilibatkan oleh pemerintah melalui forum diskusi, serta kemitraan dalam program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan pemuda. Selain itu, kami berperan dalam fasilitasi sertifikasi, dan monitoring perkembangan wirausaha, serta turut serta dalam evaluasi dampak program.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Vina Rohmatul Ummah Mahasiswi Fatayat NU Kota Yogyakarta juga mengatakan:

“Kami diikutsertakan pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti sosialisasi, public hearing, maupun FGD lainnya.” (Wawancara, 23 Februari 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY mengatakan:

“HIPMI DIY secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum diskusi, audiensi dengan dinas terkait, serta kemitraan dengan stakeholder ekonomi daerah. Mekanisme komunikasi ini cukup efektif, meskipun perlu ditingkatkan dalam hal sinergi dan percepatan implementasi kebijakan yang berdampak langsung bagi pengusaha muda.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda menyatakan:

“Terdapat beberapa forum dan mekanisme koordinasi antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Forum Pemuda DIY. Mekanisme ini sudah efektif dalam membuka komunikasi, dan masih perlu peningkatan dalam tindak lanjut hasil diskusi, sinergi program, serta keterlibatan lebih aktif (kaderisasi) dari pemuda dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Mekanisme komunikasi dan koordinasi dalam kolaborasi di DIY melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kepemudaan, akademisi, dan sektor lainnya. Komunikasi dilakukan melalui forum diskusi, audiensi, pertemuan lintas sektor, serta koordinasi dengan PD dan stakeholder terkait. Mekanisme ini mencakup penyusunan kebijakan, evaluasi program, fasilitasi kegiatan kepemudaan, serta pelibatan pemuda dalam perencanaan dan implementasi program. Meski telah berjalan, efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan pemuda.

Pembangunan kepemudaan merupakan proses berkelanjutan dalam mempersiapkan generasi muda agar memiliki kapasitas, integritas, dan daya saing untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa secara aktif dan produktif (Suyono, 2005). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan memfasilitasi segala aspek yang berkaitan dengan pemuda, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan, serta partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan (Efendi, 2020). Dalam konteks ini, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda, serta sektor lainnya menjadi elemen penting guna memastikan efektivitas program dan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi pemuda secara optimal (Fitriyanti & Pradana, 2022).

Di DIY hasil konkret yang telah dicapai melalui kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan menurut hasil wawancara adalah sebagai berikut.

Dr. Didik Wardaya, SE,M.Pd Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud mengatakan:

“Hasil kongkret Disdikpora mendorong meningkatkan IPP domain pendidikan, kesempatan mengenyam pendidikan beasiswa berkelanjutan bagi pemuda supaya pemuda memiliki kesempatan supaya mereka memperoleh pendidikan lebih tinggi, menciptakan pelatihan kewirausahaan, marketing online, usaha2 memelihara ikan, inovasi wirausaha. Pemuda tidak hanya mencari kerja tetapi dapat menciptakan kerja, melatih mereka mengembangkan kemampuan memimpin, candra dimuka pemuda bagaimana menyampaikan aspirasi secara bijak, profesional, bertanggungjawab sesuai peran masing-masing.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY mengatakan:

“Hasil konkret Indeks-Indeks ada indikator yaitu IPP bagaimana pembangunan pemuda di suatu daerah menunjukan bahwa upaya pembangunan pemuda sudah cukup meskipun banyak yang harus diperbaiki, kesehatan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY mengatakan:

“Rencana aksi pembangunan kepemudaan, yang lebih jauh IPP tertinggi se Indonesia. Dokumen, prestasi secara nasional yang dicapai oleh pemuda.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Prof. Guntur Rektor III UNY menyatakan:

“Sudah mengedukasi masyarakat secara langsung melalui pemuda. Dengan tolak ukur Tri Darma Perguruan Tinggi. Setiap naik pangkat wajib ada pengabdian untuk mendarma baktikan ke masyarakat dan pemuda.” (Wawancara, 20 Februari 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY mengatakan:

“Manfaat utama adalah adanya akses lebih mudah terhadap program pendanaan UMKM, pelatihan bisnis, serta kemudahan regulasi dalam mendukung usaha kecil dan menengah. Selain itu, kolaborasi ini juga membuka peluang kemitraan strategis dengan lembaga keuangan dan korporasi besar.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Vina Rohmatul Ummah Mahasiswi Fatayat NU Kota Yogyakarta mengatakan:

“Manfaatnya tentunya pendanaan. Disamping itu organisasi kami beberapa kali menjadi sasaran program sosialisasi PD.” (Wawancara, 23 Februari 2025)

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 menyatakan:

“Hasil Indeks Pembangunan Pemuda ada di DIY menjadi yang pertama artinya bisa terlihat 4 dari lima domain kita menduduki peringkat yang pertama. Tidak hanya peran Disdikpora tetapi lintas PD bisa melakukan kegiatan program kepemudaan karena program kepemudaan hampir semua bisa menjadi program kegiatan untuk mereka.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY juga mengatakan bahwa:

“Kerjasama lintas PD, pemuda terfasilitasi baik dari BPO maupun PD di DIY, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah pemuda di DIY.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan di DIY telah menghasilkan berbagai pencapaian konkret, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang menempatkan DIY sebagai daerah dengan peringkat tertinggi secara nasional. Upaya ini diwujudkan melalui program beasiswa berkelanjutan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pendanaan bagi UMKM, serta penguatan kapasitas pemuda dalam kepemimpinan dan penyampaian aspirasi secara profesional. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam program sosialisasi dan pengabdian masyarakat semakin diperluas, dengan dukungan lintas sektor yang memungkinkan sinergi antara PD, institusi pendidikan, dan organisasi kepemudaan. Meskipun berbagai inisiatif telah berjalan, masih diperlukan peningkatan dalam hal jangkauan program agar manfaat yang diberikan lebih signifikan bagi jumlah pemuda yang lebih luas di DIY.

Dalam penelitian ini, teori *Collaborative Governance* yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007), yang menitikberatkan pada empat indikator utama yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*).

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi awal mengacu pada latar belakang sosial-politik dan sejarah hubungan antarpihak sebelum kolaborasi dimulai. Dalam penelitian ini, kondisi awal ditunjukkan melalui pola relasi antar PD di DIY.

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 menyatakan:

“Kolaboratif mendasarkan Perpres 43 Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan Pergub Tim Koordinasi lintas sektor. Tim akan berbagi sesuai dengan ranahnya masing-masing. Bagaimana meningkatkan 5 Domain besar IPP sehingga koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara maksimal. Proses berawal dari membuat tim berbagi sesuai ranah masing-masing. Fokus meningkatkan IPP.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sedangkan Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY menyatakan bahwa:

“Peran BPO menjadi penggerak dari kerjasama lintas PD ini karena adanya regulasi Perpres 43 Tahun 2022 tentang kerjasama lintas sektor.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY mengatakan:

“Kolaboratif lintas sektor sudah terkoordinasi dari instruksi pemda DIY, sudah terbiasa bekerjasama dengan teman-teman pemuda dan CSR kerjasama non formal, aktivitas pemuda banyak yang membantu kegiatan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Lebih lanjut Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY juga mengatakan:

“Kolaborasi sudah menjadi hal biasa dengan sesama PD, Organisasi kepemudaan dan sektor diluar itu.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi pada data jumlah peserta kegiatan yang dihimpun dari berbagai PD DIY selama periode 2023 hingga 2025, diketahui bahwa keterlibatan pemuda dalam program-program lintas sektor mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, tercatat ada 14 PD yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pemuda. Aktivitas

kolaboratif ini meningkat di tahun 2024, dari segi jumlah PD yang terlibat (15 PD). Hal ini didorong terutama oleh kegiatan masif dari PD seperti BNNP, DP3AP2, dan Perpustakaan & Kearsipan. Namun, pada tahun 2025, partisipasi mengalami penurunan tajam, dalam hal jumlah perangkat daerah (hanya 8 PD). Penurunan ini mencerminkan tantangan kesinambungan kolaborasi dan perlunya strategi penguatan partisipasi antar sektor secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi awal menjadi dasar yang memengaruhi dinamika kolaborasi, yang dalam konteks DIY ditandai oleh keberadaan regulasi formal, seperti Peraturan Presiden dan Pergub DIY, serta adanya pengalaman kerja sama antar PD yang sebelumnya telah terjalin, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan partisipasi antar dinas.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan mengacu pada struktur formal, aturan main, serta mekanisme koordinasi yang mengatur proses kolaboratif. Dalam penelitian ini, desain kelembagaan tercermin dari keberadaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam Keputusan Gubernur DIY No. 57/TIM/2024 serta peran RAD (Rencana Aksi Daerah) Pelayanan Kepemudaan DIY yang memberi kerangka kerja formal bagi kolaborasi.

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 menyatakan:

“Kolaboratif mendasarkan Perpres 43 Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan Pergub Tim Koordinasi lintas sektor. Tim akan berbagi sesuai dengan ranahnya masing-masing. Bagaimana meningkatkan 5 Domain besar IPP sehingga koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara maksimal. Proses

berawal dari membuat tim berbagi sesuai ranah masing-masing. Fokus meningkatkan IPP.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sementara itu Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY menyatakan pandangannya sebagai berikut:

“Kolaboratif lintas sektor pembangunan kepemudaan mengacu pada perda tentang pelayanan kepemudaan dan RAD kepemudaan seperti UU, Perpres pembangunan kepemudaan tentang penyiaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Regulator, membuat kerangka kebijakan peraturan, RAD melibatkan biro kesra. Fasilitator, oleh BPO, Dinas Koperasi punya inkubasi bisnis menyalurkan pemuda, dinas naker untuk menjembatani, organisasi pemuda sebagai wadahnya, pramuka, kebencanaan. Dunia usaha, akademisi untuk pengembangan kepemudaan masyarakat dari organisasi di desa karang taruna yang harus bersama dikolaborasikan di satukan dalam bentuk kegiatan yang terkoordinasi.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan dalam kolaborasi kepemudaan di DIY telah dibangun secara sistematis melalui pembentukan Tim Koordinasi dan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagai kerangka kerja resmi antar sektor.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan dalam *Collaborative Governance* bukan bersifat komando, melainkan memfasilitasi. Peran Kepala Disdikpora DIY sebagai ketua Tim Pelaksana serta Bapperida sebagai perencana strategis dianalisis dalam konteks seberapa jauh mereka mampu memfasilitasi kolaborasi antarsektor.

Berdasarkan hasil wawancara Dr. Didik Wardaya, SE, M.Pd. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud mengatakan:

“Konteks Dikpora sebagai PD yang membidangi kepemudaan sebagai koodinator yang membidangi langsung, Disdikpora bisa menjembati untuk kerjasama. Terkait gender maka berkerjasama dengan DP3AP2, Tanggap bencana bekerjasama dengan Dinsos supaya target dalam domain IPP menjadi lebih mudah, saatnya pembangunan dilaksanakan dengan kolaborasi. Termasuk domain kesehatan dengan Dinkes budaya anti rokok, bnnp, kepolisian, menekan korban kejahatan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan dengan Pol PP.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY juga mengatakan bahwa:

“Ada peran instansi Bapperida yakni melakukan monev, evaluasi program dijalankan apakah pihak-pihak terlibat sudah tahu peran masing-masing. Sehingga Baperrida bisa menjembatani kerjasama lintas sektor tersebut. Pencermatan rencana aksi, Mendanai kegiatan yang dilaksanakan di PD meskipun tidak spesifik kegiatan di khususkan untuk pemuda, Mendorong mitra untuk bekerjasama dengan lintas PD sehingga bisa menyasar ke pelayanan kepemudaan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Sedangkan Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY menyatakan bahwa:

“Peran BPO menjadi penggerak dari kerjasama lintas PD ini karena adanya regulasi Perpres 43 Tahun 2022 tentang kerjasama lintas sektor.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda mengatakan:

“Organisasi kami berperan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda di DIY melalui pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kami juga memfasilitasi sertifikasi produk, penguatan jaringan bisnis, serta kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas untuk menciptakan ekosistem wirausaha muda yang berkelanjutan.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi kepemimpinan fasilitatif, peran instansi seperti Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Bapperida, serta Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) cukup menonjol sebagai aktor yang mampu menjembatani koordinasi antar lembaga serta mengakomodasi keterlibatan aktor non-pemerintah seperti organisasi pemuda dan dunia usaha.

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Proses kolaboratif merupakan inti dari model *Collaborative Governance* yaitu bagaimana interaksi antar aktor berlangsung secara berulang (iteratif) dalam jangka panjang. Penelitian ini akan memetakan dinamika dialog dan koordinasi antar lembaga sebagai wujud dari proses kolaboratif dalam pembangunan kepemudaan.

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY menyatakan:

“Koordinasi lintas sektor bersama-sama dengan PD dan TAPD sebagai fasilitator akan banyak bekerjasama dengan BPO, Kesra sebagai upaya memaksimalkan forum kepemudaan untuk menghubungkan issue kemiskinan, program di Bapperinda sebg sekretariat PLST forum pelaksana koordinasi dunia usaha (CSR), yang bisa melibatkan pemuda. Aplikasi sinangkis yang bisa dikerjasamakan dengan PD, CSR, dan Masyarakat yang berhubungan dengan pelatihan pemuda dikantong kemiskinan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY mengungkapkan:

“HIPMI DIY sering dilibatkan dalam berbagai forum diskusi dan kebijakan ekonomi daerah, termasuk dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, program kemitraan dengan BUMN/BUMD,

serta evaluasi efektivitas program dukungan bagi pengusaha muda.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda mengatakan:

“Organisasi kami dilibatkan oleh pemerintah melalui forum diskusi, serta kemitraan dalam program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan pemuda. Selain itu, kami berperan dalam fasilitasi sertifikasi, dan monitoring perkembangan wirausaha, serta turut serta dalam evaluasi dampak program.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Lebih lanjut Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda menyatakan:

“Terdapat beberapa forum dan mekanisme koordinasi antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Forum Pemuda DIY. Mekanisme ini sudah efektif dalam membuka komunikasi, dan masih perlu peningkatan dalam tindak lanjut hasil diskusi, sinergi program, serta keterlibatan lebih aktif (kaderisasi) dari pemuda dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Berikut adalah dokumentasi dari proses kolaborasi antar sektor.





Berdasarkan pada hasil wawancara dan dokumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator proses kolaboratif juga telah berjalan, tercermin melalui berbagai forum tatap muka, pelibatan pemuda dalam musyawarah, dan kegiatan terpadu antar sektor, meskipun konsistensinya masih perlu diperkuat agar seluruh pemangku kepentingan terlibat secara berkelanjutan.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kolaboratif *Government* Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Faktor Pendukung Kolaboratif *Government* Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak hanya bergantung pada peran pemerintah semata, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu tata kelola kolaboratif. Mengacu pada konsep *multipartner governance* yang dikemukakan oleh Agrawal dan Lemos, dukungan terhadap *collaborative governance* dalam pembangunan kepemudaan di DIY mencakup sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas sipil. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya kebijakan dan program yang bersifat *hybrid*, seperti kerja sama publik-privat-sosial dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, dan pemberdayaan pemuda (Astuti et al., 2020).

Dalam hasil wawancara tentang faktor utama yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan di DIY.

Dr. Didik Wardaya,SE,M.Pd Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud mengatakan:

“Bentuk perhatian pemerintah , kedulian yang didukung program atau kegiatan yang ditawarkan Pemda yang memiliki daya tarik bagi pemuda. Membangun starup baru dengan menggunakan digital. Karakter erat dengan linkungan budaya bisa menjadi daya tarik bagi pemuda dengan dukungan orang tua, pemerintah.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY mengatakan:

“Wilayah yang sempit, sarana prasarana terkait teknologi informasi baik, misalnya pendataan organisasi pemuda di DIY, data kependudukan bisa disortir, wilayah mana yang rawan masalah kesehatan sehingga ini mempengaruhi keberhasilan. Evaluasi RAD dengan zoom, Google workshop untuk pendataan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY menyatakan:

“Tahu tupoksi, bekerja jangan hanya memenuhi standard kerja tetapi harus bekerja melebihi target yang dicapai pemda DIY, bisa memanfaatkan sengkung oleh teman-teman kerja sekantor, tanpa merasa diperintah, tanpa merasa disuruh.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Prof. Guntur Rektor III UNY mengatakan:

“Dukungan utama adalah dana yang diberikan untuk pengabdian.” (Wawancara, 20 Februari 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY mengatakan:

“Beberapa faktor penting adalah komitmen bersama dalam pemberdayaan ekonomi, keterbukaan komunikasi antara HIPMI dan pemerintah, serta adanya kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Keberlanjutan program dan keterlibatan aktif stakeholder juga menjadi kunci sukses kolaborasi ini.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda menyatakan:

“Faktor yang mendukung kolaborasi yang baik antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah DIY meliputi: 1) Komunikasi yang Terbuka & Inklusif: Adanya forum diskusi rutin dan keterlibatan aktif pemuda dalam perumusan kebijakan, 2) Dukungan Regulasi & Kebijakan:

Kebijakan yang berpihak pada pengembangan kewirausahaan pemuda, seperti Permenpora No. 1 Tahun 2023 dan program dari Balai Pemuda & Olahraga DIY, 3)Kesinambungan Program & Pendanaan: Pemerintah memberikan bantuan modal, pelatihan berkelanjutan, serta fasilitasi sertifikasi usaha bagi pemuda, 4)Kolaborasi dengan Pihak Swasta & Akademisi: Sinergi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, universitas, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Vina Rohmatul Ummah Mahasiswi Fatayat NU Kota Yogyakarta juga mengatakan:

“Pemerintah turut aktif dalam memberikan ruang komunikasi, baik secara langsung maupun melalui forum-forum binaan.” (Wawancara, 23 Februari 2025)

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 menyatakan:

“Tanggungjawab dari semua PD untuk memberikan yang terbaik, bagi Pemda kalau bicara pembangunan pemuda maka PD yang lain harus ikut campurtangan dan peduli terhadap pembangunan pemuda.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY juga mengatakan bahwa:

“Faktor utama yang mendorong kolaborasi : komunikasi, kepedulian, kerjasama, keinginan bersama untuk mengentaskan pemuda sehingga mereka mampu ikut menjadi subjek pembangunan bukan menjadi objek pembangunan.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan di DIY didukung oleh berbagai faktor utama, termasuk perhatian dan dukungan pemerintah dalam bentuk program-program yang

menarik bagi pemuda, pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas pendataan dan evaluasi, serta kesadaran akan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai target pembangunan. Selain itu, faktor penting lainnya adalah ketersediaan pendanaan, komitmen bersama antara pemerintah dan stakeholder, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan kewirausahaan pemuda. Keterbukaan komunikasi, keterlibatan aktif organisasi kepemudaan, dan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat turut memperkuat ekosistem pembangunan kepemudaan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan dan kepedulian semua pihak, pemuda di DIY dapat lebih berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

2. Faktor Penghambat Kolaboratif *Government* Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bryson *et al.* (2006) menyoroti bahwa meskipun kolaborasi ini memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, pelaksanaannya tidak selalu mudah karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan dinamika yang berbeda. Pendekatan kolaboratif menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghambat efektivitas program dan kebijakan yang telah dirancang. Faktor-faktor seperti perbedaan visi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya keterlibatan aktif dari pihak-pihak tertentu dapat menjadi tantangan dalam implementasi *collaborative governance*.

Berdasarkan hasil wawancara tentang hambatan kolaboratif *Government* di DIY adalah sebagai berikut.

Dr. Didik Wardaya,SE,M.Pd Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud mengatakan:

“Hambatan yang ada yakni koordinasi merupakan satu kata tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal, koordinasi membangun satu kesadaran yang sama untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi pemuda dengan berbagai program, subjek, titik masalah, perlu disinkronkan, karena peran pemuda ke depan sangat penting.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY menyatakan:

“Hambatan berupa kolaborasi masing-masing PD punya target dan ego sektoral, maka untuk mengatasi butuh waktu dan komunikasi, jenis aktifitas dan kerjasama yang tidak saling memberatkan. Perlu langkah panjang untuk bisa mengangkat isu kebutuhan bersama yang belum optimal dijalankan. Pemahaman pemangku kebijakan tentang pembangunan dan failitasi kepemudaan belum maksimal. Domain kesehatan misalnya perlu campur tangan dinas PD untuk penyadaran kesehatan narkoba bnnp.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY mengatakan:

“Hambatannya yakni kekurangan tenaga kerja, bidang-bidang bisa ambil tenaga kerja dari bidang di tempat lain. Dengan pokja-pokja tersebut maka hambatan akan bisa diselesaikan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Prof. Guntur Rektor III UNY mengatakan:

“Tidak ada Hambatan yang berarti, setelah menyampaikan tujuan, dan lain-lainnya, sebelum melakukan pengabdian dilakukan survei terlebih dahulu sehingga nyambung antara program yang dibuat dan teori yang seharusnya. Pengabdian dilakukan dengan menyadarkan ke masyarakat.

Setelah ada komunikasi yang baik, maka bisa diatasi.”
(Wawancara, 20 Februari 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY mengatakan:

“Kendala utama yang dihadapi adalah birokrasi yang masih cukup panjang dalam pengurusan izin usaha dan akses modal, kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah dan kebutuhan riil pengusaha muda, serta keterbatasan informasi mengenai peluang kerja sama yang bisa dimanfaatkan oleh anggota HIPMI.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda juga mengatakan bahwa:

“Beberapa kendala yang dihadapi dalam kolaborasi dengan pemerintah atau pihak lain dalam pembangunan kepemudaan meliputi: 1) Akses Business Matching: Banyak program kewirausahaan pemuda masih menghadapi keterbatasan dalam akses ke investor. 2) Partisipasi Pemuda yang Masih Rendah: Tidak semua pemuda memiliki akses informasi atau tertarik untuk terlibat dalam program kepemudaan, sehingga diperlukan sosialisasi lebih luas.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Vina Rohmatul Ummah Mahasiswi Fatayat NU Kota Yogyakarta mengatakan:

“Pendanaan, kemudian faktor eksternal di masyarakat, seperti perbedaan kelompok/kepentingan.” (Wawancara, 23 Februari 2025)

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 menyatakan:

“Hambatan: dapat dilihat darimana, karena hambatan di seksi pemuda hanya ada 2 ASN dan 1 kepala seksi, waktu kegiatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan masalah

SDM untuk dapat menjangkau semua yang harus dikoordinasikan.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY mengatakan:

“Kurangnya pemahaman PD di DIY pentingnya pembangunan pemuda, kurangnya fasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda sehingga pemuda merasa bukan aspek pokok yang perlu mendapatkan perhatian.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan pemuda menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan dan inklusif. Keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi aktif pemuda, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan akademisi. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kompleks, serta perbedaan visi dan kepentingan masih menjadi penghambat. Berdasarkan hasil wawancara, berikut rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi di DIY.

Dr. Didik Wardaya,SE,M.Pd Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud menyampaikan:

“Indeks sudah jelas, sasarannya sudah jelas tetapi anak-anak pra pemuda juga perlu mendapatkan perhatian, menyususun program yang berkelanjutan pada masing-masing jenjang usia dengan program yang berbeda-beda. Kepemimpinan berbagai jenjang usia awal mahasiswa dan kemandirian usaha penting. Kolaborasi antar PD perlu diperkuat, program jangan sampai tumpang tindih, Bapedda sekarang menjadi Bapperida sebagai kunci agar program bisa terlaksana dengan beban anggaran sehingga perlu

kolaborasi kerjasama dan sinergi.” (Wawancara, 15 Februari 2025)

Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY mengatakan:

“Upaya sosialisasi tentang regulasi seperti Perda, RAD , melaksanakan kerjasama misalnya dengan Balai Tekomdik sosialisasi atau potcash kepemudaan untuk bisa menyasar ke masyarakat. Tim yang tergabung dalam RAD perlu dikonsolidasi lagi, hambatan apa yang perlu diperbaiki.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY menyatakan:

“Perjanjian kerja dan Pakta Integritas perlu memahami target program kerja perlu ditaati maka tidak akan ada masalah. Bekerja untuk organisasi dan organisasi punya target terukur maka harus melebihi target yang ditetapkan.” (Wawancara, 21 Februari 2025)

Prof. Guntur Rektor III UNY merekomendasikan:

“Kepemudaan di DIY hampir sama dan yang terdepan karang taruna, Setiap periodik gelaran program di tiap-tiap kabupaten kelurahan perlu lebih sering antara organisasi pemuda, karang taruna maka program-program harus lebih banyak fokus pada kebutuhan masyarakat untuk mendorong kehidupan bermasyarakat baik ekonomi, pola pikir, tata kelola di desa yang bersifat sosial. Membuka wacana menyikapi keadaan dan situasi saat ini, bagaimana kepemudaan bisa menciptakan lapangan kerja tetapi justru blunder, mis mudah terprovokasi, best praktise. Perlu pelatihan bagaimana mengelola limbah plastik menjadi sesuatu. Kesehatan mental pemuda, mahasiswa yang baru masuk kampus ada bimbingan konseling psikologi, kuliah umum tentang bahaya narkotika, etika dan komunikasi masuk media sosial. Penggunaan IT ada pelatihan IT, bahasa Inggris.” (Wawancara, 20 Februari 2025)

Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY menyampaikan:

“Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan percepatan implementasi program bagi UMKM, memperkuat sinergi dalam kebijakan ekonomi daerah, serta membuka lebih banyak ruang dialog yang melibatkan pengusaha muda dalam perumusan kebijakan. Selain itu, optimalisasi program digitalisasi bisnis dan akses pasar bagi UMKM perlu terus didorong.” (Wawancara, 27 Februari 2025)

Fahmi Nur Priambudi Mahasiswa dan Alumni Kewirausahaan Pemuda menyarankan:

“Untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kolaborasi antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah DIY, beberapa perbaikan yang dapat dilakukan adalah: 1) Sinergi & Integrasi Program: Meningkatkan koordinasi agar program pemerintah dan organisasi kepemudaan lebih sinkron, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung. 2) Peningkatan Akses Pendanaan: Memperluas peluang pendanaan dan hibah bagi wirausaha muda, serta memfasilitasi kemitraan dengan investor dan sektor swasta. 3) Peningkatan Partisipasi Pemuda: Mengembangkan platform digital dan forum terbuka agar lebih banyak pemuda dapat mengakses informasi, berpartisipasi, dan memberikan masukan dalam kebijakan kepemudaan.” (Wawancara, 25 Februari 2025)

Vina Rohmatul Ummah Mahasiswi Fatayat NU Kota Yogyakarta mengatakan:

“Agar dibentuk forum rutin, agar penyerapan aspirasi dari organisasi bisa maksimal.” (Wawancara, 23 Februari 2025)

Drs. Priya Santosa sebagai Kepala BPO Dinas Dikpora DIY 2022-2025 menyatakan:

“Belum semua PD maksimal muncurahkan perhatian pada pembangunan kepemudaan, tetapi PD bisa menjadikan core

pemuda dapat menjadikan pemuda sebagai kelompok sasaran 50% plus 1. Kementerian menyebutkan pedulian terhadap pemuda 50+1 maka perlu menjadi pemahaman bersama. Perlu dipertajam bagaimana memaksimalkan pemuda agar dapat memaksimalkan program kegiatan diluar pemuda dan olahraga.” (Wawancara, 14 Februari 2025)

Sugeng Wahyudi, S.Pd, M.Pd PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY merekomendasikan:

“Perlu duduk bersama, berkoordinasi untuk membangun dan memfasilitasi pemuda sehingga harapan mewujudkan Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud dengan kerjasama yang baik antar PD. Penguanan data pemuda baik itu peserta program maupun secara umum, sehingga terpetakan dengan baik kebutuhan dan kepentingan pembangunan pemuda di DIY. Stake holder perlu lebih gencar lagi menggerakan pemuda dalam rangka memaksimalkan peran pemuda saat ini dan masa depan.” (Wawancara, 5 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan pemuda di DIY. Diperlukan perencanaan program yang berkelanjutan sesuai jenjang usia serta koordinasi antar PD agar tidak terjadi tumpang tindih. Sosialisasi regulasi dan konsolidasi tim RAD perlu diperkuat guna mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan kepemudaan. Disiplin dalam pencapaian target melalui perjanjian kerja dan pakta integritas menjadi faktor penting. Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna perlu lebih aktif dalam program berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan. Transparansi, percepatan implementasi program, serta ruang dialog dengan pengusaha muda harus ditingkatkan untuk mendukung

pertumbuhan UMKM. Peningkatan akses pendanaan, pemanfaatan platform digital, dan pelatihan berbasis teknologi, termasuk bimbingan psikologis bagi mahasiswa baru, menjadi langkah strategis. Kolaborasi yang lebih erat antar stakeholder diperlukan untuk membangun sinergi dalam pembangunan kepemudaan yang inklusif demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

C. Pembahasan

Kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan di DIY telah menghasilkan berbagai pencapaian yang signifikan, terutama dalam peningkatan IPP. IPP yang tinggi mencerminkan keberhasilan daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan pemuda di berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, serta sektor swasta yang turut berperan dalam memberikan peluang bagi pemuda untuk berkembang. Berbagai kebijakan dan program strategis telah disusun untuk memastikan bahwa pemuda DIY memiliki akses yang luas terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan kerja, serta ruang partisipasi dalam pembangunan daerah.

Salah satu program unggulan dalam pembangunan kepemudaan di DIY adalah pemberian beasiswa berkelanjutan yang ditujukan bagi pemuda dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Program ini tidak hanya mencakup bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, tetapi juga mendukung peningkatan keterampilan melalui berbagai kursus dan pelatihan berbasis industri. Dengan adanya beasiswa ini, pemuda DIY memiliki peluang yang lebih besar untuk menempuh pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Selain beasiswa akademik, pemerintah daerah juga

memberikan fasilitas berupa pelatihan keterampilan digital, pengembangan keahlian teknis, serta pendampingan bagi mereka yang ingin terjun ke dunia profesional maupun wirausaha.

Selain dukungan di bidang pendidikan, DIY juga aktif mendorong pertumbuhan wirausaha muda melalui pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan bagi UMKM. Program pelatihan ini melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, akademisi, serta praktisi bisnis yang memberikan pembekalan terkait strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta inovasi produk. Akses pendanaan juga semakin diperluas melalui kemitraan dengan bank daerah dan lembaga keuangan lainnya, sehingga pemuda yang ingin memulai atau mengembangkan usaha dapat memperoleh modal dengan lebih mudah. Dengan adanya ekosistem yang mendukung, semakin banyak pemuda yang berani berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru di DIY.

Di sisi lain, penguatan kapasitas kepemimpinan pemuda juga menjadi fokus utama dalam pembangunan kepemudaan di DIY. Berbagai pelatihan kepemimpinan diselenggarakan untuk membekali pemuda dengan keterampilan dalam menyampaikan aspirasi secara profesional, bernegosiasi, serta mengelola organisasi. Organisasi kepemudaan, seperti Karang Taruna, Himpunan Mahasiswa, dan komunitas sosial, juga diberdayakan agar dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam berbagai forum kebijakan publik juga semakin diperkuat agar mereka memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Tabel 4.3 Temuan Data

No	Perangkat Daerah (PD)	Jumlah Peserta 2023–2025	Temuan Wawancara	Analisis Peran
1	DP3AP2	51.898	(Prof. Guntur - UNY): Perlu lebih banyak program berbasis Karang Taruna.	PD dengan pelibatan tertinggi. Program banyak menyasar isu sosial dan perlindungan anak/pemuda.
2	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	45.937	(Ari S. Putro - Bapperida): Sosialisasi perlu diperkuat, pemuda belum semua tahu program.	Aktif melibatkan pemuda dalam kegiatan literasi dan pendidikan nonformal, tetapi belum terkoordinasi lintas PD.
3	BNNP DIY	35.775	(Data Rini): Program edukasi anti narkoba kolaborasi lintas sektor.	Fokus pada pencegahan narkoba. Perlu sinergi berkelanjutan dengan PD yang bergerak di bidang pendidikan dan pemuda.
4	Tenaga Kerja & Transmigrasi	4.778	(Anjar Prihatanto - UMKM): Perlu percepatan implementasi pelatihan dan akses kerja bagi pemuda.	Menyasar sektor vokasional dan ketenagakerjaan, namun belum menyentuh dimensi wirausaha secara maksimal.

5	Disdikpora/BPO DIY	Tidak terdata langsung*	(Drs. Suhirman - Disdikpora): Perlu penguatan pakta integritas dan evaluasi capaian.	BPO mengelola program strategis (Paskibraka, wirausaha muda, relawan, dll). Perlu input data peserta tahunan.
6	Tata Pemerintahan Setda	2.203	(Data Rini): Sebagai fasilitator koordinasi kebijakan.	Punya jumlah cukup tinggi di awal, tetapi drop di 2025. Diduga karena peran administratif, bukan eksekutor kegiatan langsung.
7	BKKBN	1.410	Fokus pada generasi berencana. Tidak disebut dalam wawancara.	Program kepemudaan lebih bersifat kampanye tematik (GenRe). Belum terhubung ke Karang Taruna atau wirausaha.
8	Kebudayaan	4.405	Perlu pelibatan pemuda dalam pelestarian budaya.	Aktif, konsisten tiap tahun. Berpotensi dikolaborasikan dengan pendidikan karakter.
9	BLK & PP	1.018	Fokus vokasi, namun belum terdengar kolaborasi luas.	Perlu interlink dengan UMKM dan koperasi agar hasil pelatihan terserap pasar kerja.
10	Pariwisata	505	Belum terstruktur melibatkan komunitas pemuda.	Perlu model pelibatan komunitas pemuda desa wisata atau duta pariwisata.

11	Kop & UMKM	520	(Anjar Prihatanto): Penting adanya inkubator usaha pemuda.	Sudah mulai menyentuh wirausaha muda tapi belum masif. Perlu pendampingan intensif pasca pelatihan.
12	Kesbangpol	15.154	Diarahkan untuk pelatihan bela negara dan kader ideologi kebangsaan.	Jumlah signifikan, perlu integrasi lebih baik dengan organisasi kepemudaan (OSIS, Karang Taruna, dan lain-lain).
13	Kominfo	60	Pemuda belum banyak disentuh dengan literasi digital.	Perlu diperkuat melalui pelatihan TIK dan pengelolaan media sosial pemuda.
14	Bina Mental Spiritual	100	Terbatas hanya di kegiatan keagamaan formal.	Potensi untuk disinergikan dengan kegiatan karakter dan nilai-nilai integritas.
15	Pertanian & Ketahanan Pangan	25	Tidak disebut dalam wawancara.	Nyaris tidak melibatkan pemuda. Perlu inisiasi program seperti <i>youth agripreneur</i> .

Sumber: (Data diolah, 2025)

Data pelibatan pemuda dalam kegiatan perangkat daerah (PD) DIY tahun 2023–2025 memperlihatkan dinamika kolaboratif yang mencerminkan praktik *Collaborative Government* seperti yang dikemukakan oleh Bryson *et al.* (2006). Menurut teori tersebut, kolaborasi pemerintahan yang efektif membutuhkan penggabungan aktor dari berbagai sektor untuk menyelesaikan

masalah bersama melalui proses kolaboratif yang meliputi: (1) inisiasi; (2) pengaturan institusional; (3) membangun kepemimpinan; (4) penataan dan pengelolaan; (5) menghasilkan hasil; dan (6) akuntabilitas.

Dari wawancara dan data yang dihimpun, kita dapat mengaitkan dimensi dan sub-sub indikator Bryson dengan fakta di lapangan:

Pada dimensi inisiasi dan Kepemimpinan Awal, dukungan kuat dari pimpinan PD seperti Disdikpora (melalui komitmen pakta integritas) menunjukkan bahwa tahap awal kolaborasi dimulai dari niat dan dorongan politik yang kuat. Ini sesuai dengan pendapat Drs. Suhirman, M.Pd bahwa kerja kolaboratif perlu dibarengi kedisiplinan dan target pencapaian. Data menunjukkan bahwa Disdikpora melalui DP3AP2 secara konsisten mengikutsertakan ribuan pemuda tiap tahun (5.462 peserta pada 2023, 43.446 pada 2024, dan 2.990 pada 2025).

Secara pengaturan institusional, regulasi dan kebijakan yang mendukung pelibatan pemuda (seperti arahan dari DP3AP2 dan Bapperida) merupakan bentuk formalisasi kelembagaan kolaboratif. Hal ini diperkuat oleh keterangan Ari Siswo Putro yang menyoroti pentingnya sosialisasi untuk memperluas partisipasi pemuda, sejalan dengan pengaturan komunikasi lintas sektor. Hal ini tercermin dalam konsistensi beberapa PD seperti Perpustakaan dan Kearsipan yang melibatkan 3.235 peserta pada 2023 dan melonjak drastis menjadi 41.202 pada 2024.

Berdasarkan asas kepemimpinan kolaboratif, tokoh-tokoh dari berbagai institusi, seperti Prof. Guntur dan Anjar Prihatanto, mempraktikkan kepemimpinan lintas sektor yang mendorong peran organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan UMKM pemuda. Ini merupakan dimensi penting dari *collaborative governance* yang melibatkan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kop & UMKM

menunjukkan tren positif dengan peningkatan partisipasi dari 100 peserta pada 2023 menjadi 340 pada 2024, menunjukkan keterlibatan pemuda dalam sektor ekonomi.

Kurangnya koordinasi antar PD, seperti disebutkan dalam data dan wawancara, menjadi tantangan pada fase ini. Misalnya, beberapa PD tidak menunjukkan data pelibatan pemuda secara konsisten selama tiga tahun, seperti Kominfo dan Kesehatan. Bryson menekankan pentingnya peran fasilitator untuk menyinergikan peran masing-masing aktor agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. DP3AP2 dan Perpustakaan dan Kearsipan menonjol sebagai PD yang berhasil mengikutsertakan jumlah pemuda terbanyak selama periode 2023–2025, dengan total kumulatif masing-masing 51.898 dan 45.937 peserta. Hal ini menunjukkan hasil konkret dari kolaborasi yang efektif. Kegiatan berbasis teknologi, kewirausahaan, dan literasi menjadi bukti adanya orientasi hasil yang mendukung kemandirian dan kapasitas pemuda.

Pada sisi Akuntabilitas dan Evaluasi, Pemanfaatan pakta integritas serta evaluasi hasil program melalui IPP dan IPM (seperti disampaikan oleh Efendi, 2020) menandakan bahwa proses evaluasi dan pertanggungjawaban sudah mulai dibangun untuk mengukur sejauh mana kolaborasi berdampak pada peningkatan kualitas SDM pemuda DIY. Data kuantitatif pelibatan pemuda menjadi indikator penting dalam evaluasi tersebut, memperkuat argumen bahwa kolaborasi yang baik menghasilkan capaian partisipatif yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini berupaya mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal melalui penyusunan program berbasis partisipasi pemuda. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fitriyanti & Pradana, 2022) yang menemukan bahwa

pembangunan kepemudaan harus mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia agar dapat mengurangi tingkat pengangguran pemuda. Selain itu, penelitian (Sudirman et al., 2018) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kepemudaan sangat dipengaruhi oleh penyediaan sarana kepemudaan dan dukungan dari pemerintah daerah, aspek yang juga menjadi fokus utama dalam kebijakan kepemudaan di DIY.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (M. A. L. Hakim et al., 2023) yang menyatakan bahwa pemuda di Kabupaten Cianjur memiliki respons positif terhadap kebijakan kepemudaan dan ingin terlibat aktif dalam implementasinya. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, DIY berusaha memperkuat peran pemuda dalam pelayanan kepemudaan berbasis kebijakan nasional dan organisasi kepemudaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Arifin et al., 2021) yang menunjukkan pentingnya kebijakan anggaran desa dalam mendukung pengembangan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna.

Beberapa faktor utama yang mendukung implementasi kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY meliputi ketersediaan regulasi yang jelas, tingkat partisipasi pemuda yang tinggi, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian (Efendi, 2020) menunjukkan bahwa IPP memiliki korelasi positif dengan IPM, yang mengindikasikan bahwa investasi dalam pembangunan pemuda akan berdampak langsung pada kualitas SDM secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian (A. R. Hakim et al., 2024) menyoroti pentingnya strategi pemberdayaan pemuda dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yang relevan dengan upaya DIY dalam membangun ekosistem kewirausahaan bagi pemuda. Di sisi lain, penelitian (Suyanto, 2018)

mengungkapkan bahwa potensi pemuda dalam mempertahankan dan mengembangkan pembangunan sangat besar, sehingga program kepemudaan di DIY mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi ini.

Dalam konteks program internasional, penelitian (Zulkifli et al., 2021) serta (Lindsay et al., 2021) menekankan bahwa pendekatan PYD dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan keterlibatan pemuda melalui program yang terstruktur dan selektif. Pemerintah DIY juga berupaya mengadaptasi pendekatan ini dalam berbagai inisiatif pembangunan kepemudaan dengan memberikan pelatihan berbasis teknologi dan kewirausahaan untuk memperkuat kapasitas pemuda dalam menghadapi tantangan global.

Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, terdapat beberapa kendala dalam penerapan kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar PD, yang menyebabkan tumpang tindih program dan kebijakan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (A. R. Hakim et al., 2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas strategi pemberdayaan pemuda sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi kepemudaan.

Selain itu, adanya sosialisasi kepemudaan untuk bisa menyasar ke masyarakat perlu diperkuat berdasarkan pada wawancara dengan Ari Siswo Putro Perencana Ahli Muda Bapperida DIY. Hal ini senada dengan temuan penelitian (Sudirman et al., 2018) yang mengungkapkan bahwa salah satu strategi dan kebijakan pembangunan kepemudaan adalah mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemuda.

Berikutnya adalah disiplin dalam pencapaian target melalui perjanjian kerja dan pakta integritas menjadi faktor penting berdasarkan pada wawancara dengan Drs. Suhirman, M.Pd Ka Disdikpora DIY. Penelitian (Fitriyanti & Pradana, 2022) mengemukakan bahwa pembangunan kepemudaan harus mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertimbangan ini sangat penting agar antara tenaga kerja dengan tempatnya bekerja dapat mencapai target-target program kerja yang telah ditetapkan secara maksimal, baik program kerja yang tertuang baik pada perjanjian kerja ataupun pakta integritas. Bahkan, sangat baik apabila pemuda sebagai tenaga kerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Organisasi kepemudaan seperti karang taruna juga perlu lebih aktif dalam program berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan berdasarkan pada wawancara dengan Prof. Guntur Rektor III UNY. Hal ini senada dengan temuan penelitian (Arifin et al., 2021) yang mengemukakan bahwa melalui musyawarah Pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan pendapat terkait keberpihakan anggaran terhadap bidang pengembangan kepemudaan melalui organisasi Karang Taruna Desa.

Percepatan implementasi program juga penting untuk dilakukan, terutama bagi generasi muda yang berkompeten berdasarkan pada wawancara dengan Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan. Hal ini senada dengan temuan penelitian (Zulkifli et al., 2021) yang mengemukakan bahwa proses seleksi sangat penting untuk memilih generasi muda yang kompeten. Program yang terorganisir dan terstruktur akan berdampak positif pada generasi muda yang berpartisipasi.

Selain itu, penelitian (Suyanto, 2018) mengungkapkan adanya perbedaan pandangan terkait standar usia pemuda serta tumpang tindih peran antar lembaga, yang juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan kepemudaan di DIY. Dalam konteks ini, regulasi dan mekanisme koordinasi yang lebih baik perlu dikembangkan untuk memastikan sinergi antar aktor yang terlibat.

Hasil penelitian (Hutagaol & Tarmizi, 2020) menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM, namun masih terdapat hambatan berupa akses terhadap modal dan peluang usaha yang terbatas. Tantangan ini juga relevan dengan kondisi di DIY, dimana banyak pemuda yang memiliki potensi kewirausahaan namun mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial dan akses pasar.

Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut melalui perencanaan yang lebih matang, peningkatan transparansi, serta koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, kolaborasi antara pemerintah dan pemuda di DIY dapat semakin efektif dalam mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan.

D. Kebaruan

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan kepemudaan, pengembangan organisasi kepemudaan, serta hubungan IPP dengan IPM. Penelitian ini secara khusus juga menelaah bagaimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi kepemudaan di DIY berlangsung dalam mendukung pembangunan pemuda.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya teori *collaborative governance* melalui studi kasus spesifik di DIY. Hasil penelitian ini memperkuat teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash dengan menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai aktor, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menyempurnakan teori dengan menyoroti tantangan spesifik dalam konteks lokal, seperti ketimpangan sumber daya di antara aktor-aktor kolaborasi dan dinamika politik lokal yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan kepemudaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat konsep *collaborative governance* tetapi juga memberikan perspektif baru tentang faktor keberhasilan dan hambatan dalam kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Collaborative Governance* dalam pembangunan kepemudaan di DIY dapat diketahui melalui indikator kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*). Kondisi awal menunjukkan adanya dasar regulatif dan pengalaman kerja sama antar pihak, meskipun masih ada kesenjangan keterlibatan antar PD. Desain kelembagaan telah terbentuk secara formal melalui pembentukan tim koordinasi dan RAD, namun koordinasi teknis perlu ditingkatkan. Kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan oleh aktor kunci seperti Disdikpora dan Bapperida yang aktif memediasi lintas sektor. Sementara itu, proses kolaboratif telah berjalan melalui forum dan program bersama, meskipun konsistensinya masih perlu diperkuat untuk mewujudkan kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Faktor-faktor pendukung kolaborasi antara PD dan pemangku kepentingan lainnya mencakup komitmen birokrasi, dukungan infrastruktur, serta keterlibatan organisasi pemuda seperti Karang Taruna dan komunitas lokal. Kegiatan rutin yang difasilitasi oleh Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, seperti pelatihan Paskibraka, Jambore Pemuda, dan Pelatihan Kewirausahaan, menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan berbasis partisipatif. Namun

demikian, beberapa faktor penghambat seperti kurangnya koordinasi antar PD, *overlap* program, dan ketimpangan distribusi anggaran serta sumber daya manusia turut menjadi penyebab belum maksimalnya dampak dari program kepemudaan.

3. Peningkatan sinergi antar PD sangat diperlukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di DIY. Data kuantitatif menunjukkan bahwa sebagian besar program kepemudaan masih tersentralisasi pada instansi tertentu, sementara potensi kolaborasi dengan PD lainnya belum tergarap optimal. Oleh karena itu, perlu ada realignment kebijakan dan penjadwalan ulang kegiatan lintas sektor agar penguatan kapasitas pemuda tidak hanya menjadi tanggung jawab PD tertentu, tetapi menjadi agenda bersama seluruh PD melalui skema kolaboratif yang sistematis dan terukur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi kepemudaan, untuk memastikan sinergi dalam pembangunan kepemudaan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi rutin, pertemuan koordinasi, serta mekanisme kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif.
2. Untuk mendukung efektivitas program kepemudaan, perlu adanya peningkatan infrastruktur seperti pusat pelatihan kepemudaan, *co-*

- working space*, serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas pemuda dalam berbagai bidang.
3. Penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam dengan mengeksplorasi model kolaborasi yang lebih spesifik, seperti implementasi *collaborative governance* dalam konteks pembangunan kepemudaan di daerah lain, sehingga dapat diperoleh perbandingan dan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk optimalisasi kebijakan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dan generalisasi temuan uakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pembangunan kepemudaan di DIY, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu sepenuhnya dapat diterapkan di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berbeda.
2. Penelitian ini hanya menyoroti aspek kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor lain yang mungkin turut memengaruhi efektivitas pembangunan kepemudaan, seperti aspek budaya, teknologi, atau kebijakan spesifik lainnya, belum dikaji secara mendalam.
3. Meskipun penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, pendekatan teoretis lain yang dapat memberikan perspektif berbeda belum banyak dieksplorasi. Penggunaan teori alternatif atau pendekatan multi-teori dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Admin Warta. (2023). *Pemuda Yogyo Diminta Jadi Agen Perubahan Positif dan Produktif*.
Https://Warta.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/30468/Pemuda-Yogyo-Diminta-Jadi-Agen-Perubahan-Positif-Dan-Produktif-2023-11-25?Utm_source=chatgpt.Com.
- Afrisal, A. F. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)* [Disertasi]. Universitas Hasanuddin.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543–571.
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.
- Arifin, N. Z. I., Shihab, M. Q., & Hadiyati, S. F. N. (2021). Kebijakan Pengembangan Bidang Kepemudaan Dalam Tata Kelola APBDes (Studi Keberpihakan Pemerintah Desa Kedungturi terhadap Pengembangan Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019). *Jurnal Review Politik*, 11(02), 113–134.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance: Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.

- Asyim, R. B., & Yulianto. (2022). Perilaku Konsumsi Obat Tradisional Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Masyarakat Bangsawan Sumenep. *Jurnal Keperawatan*, 15(2), 1–13.
- Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY. (2018). *Struktur Organisasi Balai Pemuda Dan Olahraga*. <Https://Bpo-Diy.or.Id/Profil/>.
- Cakra Wikara Indonesia. (2022). *Validity: Validitas Dalam Penelitian Kualitatif*. <Https://Cakrawikara.Id/Wp-Content/Uploads/2022/03/25-Feb-2022-Validitas-Kualitatif.Pdf>.
- Citriadin, Y. (2019). *Pengantar Pendidikan*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.
- Deni. (2024). *Pemuda Kota Yogyakarta Berinteraksi, Berkolaborasi, Berpartisipasi*. Https://Radiostar.Harianjogja.Com/2024/07/05/Pemuda-Kota-Yogyakarta-Berinteraksi-Berkolaborasi-Berpartisipasi/?Utm_source=chatgpt.Com.
- Dinas Dikpora. (2021). *Rancangan Akhir Renstra 2022-2027: Rencana Strategis*. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- Dinas Dikpora DIY. (2023). *RENJA: Rencana Kerja 2024*. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- Efendi, A. (2020). Studi Korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 9(1), 39–48.
- Fitriyanti, S., & Pradana, H. A. (2022). Analisis Pembangunan Kepemudaan di Kota Banjarbaru menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan

Pemuda (Domain Pendidikan dan Lapangan & Kesempatan Kerja). *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 43–58.
<https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.257>

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 / TIM / 2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Hakim, A. R., Hanafi, I., Zulkifli, Z. A., Mardiah, A., & Syahruddin. (2024). Strategi Pemberdayaan Kepemudaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kedah. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–45.
<https://doi.org/10.25299/berdaya.2024.14860>

Hakim, L. M., & Qurbani, I. D. (2021). *Kebijakan Pembangunan Pemuda: Strategi dan Tantangannya.* Media Nusa Creative.
<https://www.researchgate.net/publication/349212163>

Hakim, M. A. L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2023). Konstruksi Dasar Masalah Implementasi Kebijakan Kepemudaan Di Kabupaten Cianjur Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 384–402. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4527>

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya.”* Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).

- Hutagalung, S. S. (2022). *Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hutagaol, S. J., & Tarmizi, H. (2020). The Effect of Youth's Role in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City. *International Journal of Research and Review*, 7(2), 332–343.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2024). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2024*. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Indeks Pembangunan Pemuda 2021*. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
- Kumara, A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Lindsay, J. E., McGarry, S., Satmukhambetova, A., Raymond, K., Lesheve, A., Jonson, S., Neeno, H., & Williams, C. (2021). Integrating Positive Youth Development: Insights From International Youth Development Programming. *Journal of Youth Development*, 16(2–3), 55–73. <https://doi.org/10.5195/JYD.2021.1037>
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–12.
- Mu'ah, Indrayani, T. I., Masram, & Sulton, M. (2019). *Kepemimpinan*. Rajawali Pers.

- Natalia, M. D. (2024). *Fasilitas Pemerintah: Pemuda DIY Bisa Manfaatkan Program Kepemudaan.*
Https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2024/05/17/510/1174864/Fasilitas-Pemerintah-Pemuda-Diy-Bisa-Manfaatkan-Program-Kepemudaan?Utm_source=chatgpt.Com.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.* Bildung.
- Rifano, A. T. S. (2021). Rifano 2021. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 5(1), 73–75.
- Suatan, A. C. M., Naukoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmih Efisiensi*, 23(4), 73–84.
- Sudirman, I., Aminawar, M., Alam, A. S., Sakharina, I. K., Darwis, M., & Kurniawan, M. E. (2018). Kajian Strategi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Bangda Simpurusiang*, 01(01), 61–79. <https://doi.org/10.33297/jbs.v1i1.2018.61-80>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Suharuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya.* CV. Pena Persada.
- Suyanto. (2018). Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomika*, 7(1), 48–57.
- Suyono, H. (2005). *Pemuda dan Pembangunan.* Yayasan Karya Pemuda.

- Tyas, A. A. W. P., & Ikhsani, K. T. W. (2015). Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Forum Ilmiah*, 12(1), 1–15.
- Wijaya, H. (2018). *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin)*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Windar, Wahidin, A., & Rasyid, A. (2022). Diskriminasi Keagamaan dan Kebudayaan terhadap Masyarakat Digital. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 99–108. <https://doi.org/10.24815/sjpu.v3i2.17553>
- Zulkifli, F., Arshad, M. M., Ismail, I. A., Abdullah, H., & Zulkefli, M. Y. (2021). Promoting Positive Youth Development: Youth Participation in International Youth Exchange Program. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(19), 26–43. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i19/11715>

DRAFT WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenalkan, saya Rini Admiwati, mahasiswi Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk Tesis dengan judul Kolaboratif *Government* Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saya bermaksusd untuk mewawancarai Bapak/Ibu/Saudata adalah untuk mengetahui pandangan dan pengalaman Bapak/Ibu/Saudata terkait kolaboratif *government* dalam pembangunan kepemudaan di DIY serta menemukan faktor pendukung dan penghambat dari kolaboratif *government* tersebut dalam pembangunan kepemudaan di DIY.

Demikian maksud dari wawancara ini saya sampaikan.

Yogyakarta, Januari 2025

Hormat Saya,

Rini Admiwati

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia : tahun

Pekerjaan :

Masa Kerja :

Organisasi :

B. Tabel Wawancara 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Staf Ahli Gubernur Bidang Sosbud	
a	Bagaimana pandangan Anda mengenai konsep kolaboratif <i>government</i> di DIY?	
b	Menurut Anda, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan sektor lainnya sudah berjalan efektif?	
c	Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda dan sektor lain dalam kolaborasi ini?	
d	Apa hasil konkret yang telah dicapai melalui kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
e	Menurut Anda, apa faktor utama yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
f	Apa saja hambatan yang dihadapi selama proses kolaborasi ini, baik dari aspek internal maupun eksternal?	
g	Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi	

	antara pemerintah dan pemuda di masa mendatang?	
--	---	--

No	Pertanyaan	Jawaban
2	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY	
a	Bagaimana pandangan Anda mengenai konsep kolaboratif <i>government</i> di DIY?	
b	Menurut Anda, peran instansi adalah?	
c	Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda dan sektor lain dalam kolaborasi ini?	
d	Apa hasil konkret yang telah dicapai melalui kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
e	Menurut Anda, apa faktor utama yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
f	Apa saja hambatan yang dihadapi selama proses kolaborasi ini, baik dari aspek internal maupun eksternal?	
g	Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi antara pemerintah dan pemuda di masa mendatang?	

No	Pertanyaan	Jawaban
3	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY	
a	Bagaimana pandangan Anda mengenai konsep kolaboratif <i>government</i> di DIY?	
b	Menurut Anda, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah,	

	organisasi kepemudaan, dan sektor lainnya sudah berjalan efektif?	
c	Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda dan sektor lain dalam kolaborasi ini?	
d	Apa hasil konkret yang telah dicapai melalui kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
e	Menurut Anda, apa faktor utama yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
f	Apa saja hambatan yang dihadapi selama proses kolaborasi ini, baik dari aspek internal maupun eksternal?	
g	Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi antara pemerintah dan pemuda di masa mendatang?	

No	Pertanyaan	Jawaban
4	Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY (Purna Tugas)	
a	Bagaimana pandangan Anda mengenai konsep kolaboratif <i>government</i> di DIY?	
b	Menurut Anda, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan sektor lainnya sudah berjalan efektif?	
c	Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda dan sektor lain dalam kolaborasi ini?	
d	Apa hasil konkret yang telah dicapai melalui kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	

e	Menurut Anda, apa faktor utama yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
f	Apa saja hambatan yang dihadapi selama proses kolaborasi ini, baik dari aspek internal maupun eksternal?	
g	Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi antara pemerintah dan pemuda di masa mendatang?	

C. Tabel Wawancara 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	
a	Bagaimana pandangan Anda mengenai konsep kolaboratif government di DIY?	
b	Menurut Anda, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan sektor lainnya sudah berjalan efektif?	
c	Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda dan sektor lain dalam kolaborasi ini?	
d	Bagaimana Anda menilai kolaborasi apakah sudah sesuai dengan teori?	
e	Menurut Anda, apa faktor utama yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
f	Apa saja hambatan yang dihadapi selama proses kolaborasi ini, baik dari aspek internal maupun eksternal?	
g	Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi antara pemerintah dan pemuda di masa mendatang?	

D. Tabel Wawancara 3

No	Pertanyaan	Jawaban
1	PLT Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY	
a	Bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah, organisasi pemuda, dan pihak lain dilaksanakan dalam pembangunan kepemudaan di DIY?	
b	Apa peran utama instansi Anda dalam mendukung kolaborasi ini, dan bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan?	
c	Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pemuda, dan sektor lain dalam kolaborasi ini?	
d	Apa hasil konkret yang telah dicapai melalui kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
e	Menurut Anda, apa faktor utama yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan?	
f	Apa saja hambatan yang dihadapi selama proses kolaborasi ini, baik dari aspek internal maupun eksternal?	
g	Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan pemuda di masa mendatang?	

E. Tabel Wawancara 4

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan - BPD HIPMI DIY	
a	Apa peran utama yang dijalankan oleh HIPMI dalam mendukung pembangunan kepemudaan di DIY?	
b	Bagaimana HIPMI dilibatkan oleh pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kepemudaan?	
c	Apakah ada forum atau mekanisme yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara HIPMI dan pemerintah? Jika ada, bagaimana penilaiannya?	
d	Apa manfaat utama yang dirasakan oleh pengusaha muda di wilayah Anda dari kolaborasi dengan pemerintah?	
e	Menurut Anda, apa saja faktor yang mendukung terciptanya kolaborasi yang baik antara HIPMI dan pemerintah DIY?	
f	Apa saja kendala yang dihadapi HIPMI saat berkolaborasi dengan pemerintah atau pihak lain dalam pembangunan kepemudaan?	
g	Menurut Anda, apa yang bisa diperbaiki agar kolaborasi antara HIPMI dan pemerintah DIY lebih efektif dan berdampak?	

No	Pertanyaan	Jawaban
2	Alumni Kewirausahaan Pemuda	
a	Apa peran utama yang dijalankan oleh Organisasi Kepemudaan Anda dalam mendukung pembangunan kepemudaan di DIY?	
b	Bagaimana Organisasi Kepemudaan Anda dilibatkan oleh pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kepemudaan?	
c	Apakah ada forum atau mekanisme yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah? Jika ada, bagaimana penilaiannya?	
d	Apa manfaat utama yang dirasakan oleh Organisasi Kepemudaan Anda dan pemuda di wilayah Anda dari kolaborasi dengan pemerintah?	
e	Menurut Anda, apa saja faktor yang mendukung terciptanya kolaborasi yang baik antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah DIY?	
f	Apa saja kendala yang dihadapi Organisasi Kepemudaan Anda saat berkolaborasi dengan pemerintah atau pihak lain dalam pembangunan kepemudaan?	
g	Menurut Anda, apa yang bisa diperbaiki agar kolaborasi antara Organisasi Kepemudaan Anda dan pemerintah DIY lebih efektif dan berdampak?	

No	Pertanyaan	Jawaban
3	Fatayat NU Kota Yogyakarta	
a	Apa peran utama yang dijalankan oleh Organisasi Kepemudaan Anda dalam mendukung pembangunan kepemudaan di DIY?	
b	Bagaimana Organisasi Kepemudaan Anda dilibatkan oleh pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kepemudaan?	
c	Apakah ada forum atau mekanisme yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah? Jika ada, bagaimana penilaiannya?	
d	Apa manfaat utama yang dirasakan oleh Organisasi Kepemudaan Anda dan pemuda di wilayah Anda dari kolaborasi dengan pemerintah?	
e	Menurut Anda, apa saja faktor yang mendukung terciptanya kolaborasi yang baik antara Organisasi Kepemudaan dan pemerintah DIY?	
f	Apa saja kendala yang dihadapi Organisasi Kepemudaan Anda saat berkolaborasi dengan pemerintah atau pihak lain dalam pembangunan kepemudaan?	
g	Menurut Anda, apa yang bisa diperbaiki agar kolaborasi antara Organisasi Kepemudaan Anda dan pemerintah DIY lebih efektif dan berdampak?	

